



**PEMERINTAH  
KOTA MAKASSAR**

# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **LKJIP**

**DINAS KESEHATAN**

**T A H U N 2023**

**JANGAN BIARKAN MAKASSAR MUNDUR LAGI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

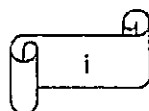
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi





optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksanaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Makassar, Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar



**dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes**  
NIP. 19730112 200604 2 012

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	iii
DAFTAR TABEL	.....	iv
DAFTAR GAMBAR	.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
A. Latar Belakang	.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	.....	2
C. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	.....	7
D. Landasan Hukum	.....	11
E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	.....	13
A. Rencana Strategis	.....	13
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	.....	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.....	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	.....	39
B. Realisasi Anggaran	.....	96
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	.....	99
BAB IV PENUTUP	.....	108
LAMPIRAN		
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023		
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan		
3. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)		
4. Piagam Penghargaan Inovasi		
5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-2026		
6. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022-2026		



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar	16
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Makassar	18
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Makassar	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023	23
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023	24
Tabel 2.6	Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 Perubahan	31
Tabel 3.1	Skala Peringkat Kerja	39
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023	41
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	50
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	55
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	58
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	60
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	71
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Sasaran Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	74
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Sasarannya Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	77

Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Sasaran Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	79
Tabel 3.11	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Sasaran Menurunnya Masalah Gizi	80
Tabel 3.12	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	96
Tabel 3.13	Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan	100



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan	.....	6
---	-------	---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan sah. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana di dalamnya mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksana program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hal ini juga didukung dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Kepala SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota Makassar. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program kerja Dinas sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
7. melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pemenuhan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
8. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pemenuhan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemenuhan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
10. menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan bidang tugasnya;



11. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan Dinas;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
13. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas.
2. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang kesehatan masyarakat.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang penyediaan fasilitas pelayanan dan layanan kesehatan.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan yang mempunyai tugas menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan di bidang pengembangan sumber daya kesehatan.

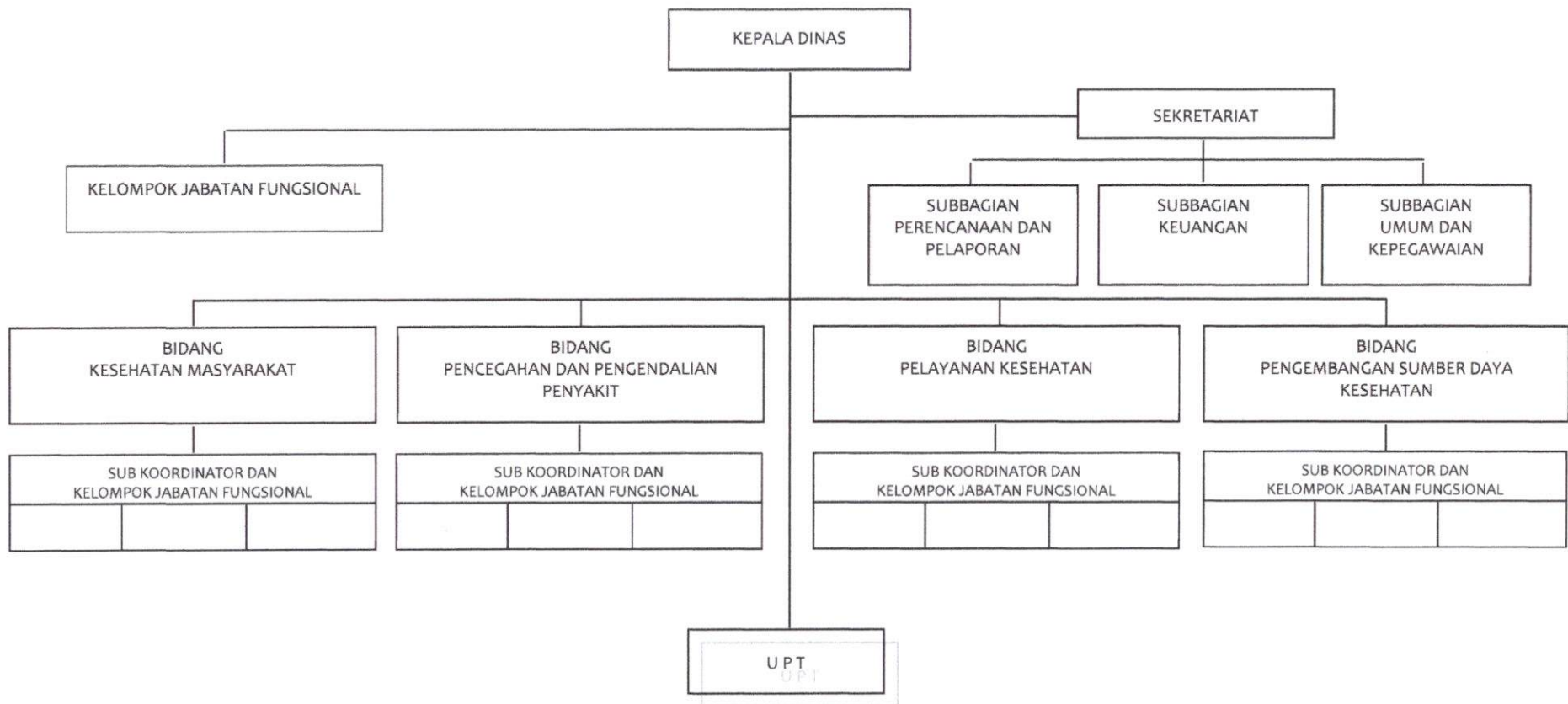


Adapun Susunan Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menjalankan fungsi dan tugas tersebut, bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagaimana bagan struktur organisasi pada halaman berikut:

**Gambar 1.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan**



**C. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Permasalahan Dinas Kesehatan Kota Makassar dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di Kota Makassar tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kematian sebanyak 12 sedangkan jumlah kematian ibu yang terendah adalah pada tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah kematian ibu masing masing sebanyak 5. AKI tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat 44 kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan atau persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKI terendah terjadi pada tahun 2017 dan 2018.

Penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) adalah meningkatnya Angka Kematian Ibu dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang disebabkan karena adanya penyakit penyerta, penyakit komplikasi pada saat hamil, persalinan dan nifas.

Pemetaan masalah tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dapat dilihat dalam tabel berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)	Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI)	Adanya penyakit penyerta, komplikasi saat hamil, persalinan dan nifas

**2. Tingginya Angka Kematian Balita (AKB)**

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB tetapi tidak mudah untuk menentukan faktor yang paling dominan dan faktor yang kurang dominan. Tersedianya



berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKB. Menurunnya AKB dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam Profil Kesehatan Indonesia dijelaskan bahwa beberapa penyebab kematian bayi dapat bermula dari masa kehamilan. Penyebab kematian bayi yang terbanyak adalah disebabkan karena pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Penyebab lainnya yang cukup banyak terjadi adalah kejadian kurangnya oksigen dalam rahim (Hipoksia intrauterus) dan kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir (Asfiksia lahir).

Penyebab masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) adalah masih adanya kematian balita yang disebabkan adanya kelaianan bawaan yang tidak bisa ditangani dan adanya penyakit penyerta, penyakit komplikasi pada saat dihamilkan maupun setelah dilahirkan.

Pemetaan masalah tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingginya Angka Kematian Balita (AKB)	Masih adanya kematian balita	Adanya kelainan bawaan yang tidak bisa ditangani
		Adanya penyakit penyerta, komplikasi pada saat dihamilkan maupun setelah dilahirkan

### 3. Adanya Permasalahan Gizi pada Ibu dan Anak

Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena selain sebagai faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi



janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil atau ibu menyusui. Karena adanya pandemi covid-19, pemberi dan penerima layanan membatasi kunjungan ke puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Terjadinya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020 telah membawa pengaruh yang fundamental terhadap perekonomian Kota Makassar sehingga menurunkan pendapatan masyarakat bahkan ada yang kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada pola hidup masyarakat, termasuk daya beli makanan sebagai salah satu upaya perbaikan gizi khususnya pada ibu maupun anak.

Hal ini mempengaruhi angka prevalensi gizi buruk, prevalensi gizi kurang maupun prevalensi stunting pada balita.

Pemetaan masalah gizi pada ibu dan anak dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Permasalahan gizi pada ibu dan anak	Adanya permasalahan gizi pada ibu dan anak	Pemberi dan penerima layanan membatasi kunjungan ke puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya
		Menurunnya daya beli makanan sebagai salah satu upaya perbaikan gizi

**4. Adanya permasalahan dalam penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular**

Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit menular tersebut antara lain Covid-19, pneumonia, tuberkulosis (TBC). Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah. Adapun masalah penyakit menular adalah masih tingginya potensi penyebaran Covid-19, rendahnya cakupan

elayanan terhadap balita penderita pneumonia, rendahnya penanganan penderita penyakit TBC, meningkatnya jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal.

Penyakit tidak menular (PTM) adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). PTM tersebut antara lain hipertensi dan Diabetes Mellitus (DM). Penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Adapun masalah penyakit tidak menular adalah menurunnya capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan Diabetes Mellitus (DM).

Pemetaan masalah dalam penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular dapat dilihat dalam tabel berikut :

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Permasalahan dalam penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Adanya permasalahan dalam penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Masih tingginya potensi penyebaran Covid-19
		Rendahnya cakupan pelayanan terhadap balita penderita pneumonia
		Rendahnya penanganan penderita penyakit TBC
		Meningkatnya jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal
		Menurunnya capaian pelayanan kesehatan pada penderita Hipetensi
		Menurunnya capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ditentukan isu strategis sebagai berikut:

1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)



3. Adanya permasalahan gizi khususnya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting
4. Banyaknya kasus penyakit menular khususnya tuberkulosis dan serta tingginya kasus penyakit tidak menular khususnya hipertensi dan diabetes mellitus (DM)

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;

#### **E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- C. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

##### Bab II Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

##### Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

##### Bab IV Penutup

##### Lampiran



### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Makassar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Makassar. Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Makassar dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Makassar dan stakeholder

Selanjutnya, Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Makassar.

Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah:

***"Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua"***

## 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021-2026 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- a. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dan indikasi korupsi.
- b. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.
- c. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang *sombere* dan *smart city* untuk semua.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar mengacu pada misi kedua, yaitu:

***Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesejahteraan kota yang kuat untuk semua.***

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	0,804	0,806	0,808	0,810	0,812
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,1	72,2	72,3	72,4	72,5
3		Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	42,17	35,4	28,63	21,87	19,21
4		Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,29	1,25	0,91	0,88	0,86
5	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi Tuberkulosis	0,2	0,2	0,188	0,185	0,18	
		Prevalensi HIV	0,041	0,038	0,035	0,032	0,029	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Menurunnya Masalah Gizi	Persentase Balita gizi Buruk	1,64%	1,54%	1,43%	1,32%	1,22%	
		Persentase Ballita Gizi Kurang	6,05%	5,79%	5,51%	5,26%	4,99%	
		Prevalensi Stunting	6,90%	6,80%	6,70%	6,60%	6,50%	

Sumber: Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar Periode 2021-2026



#### **4. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	-	Disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	$\frac{\text{Angka Harapan Hidup} - \text{Angka Harapan Hidup Minimal}}{\text{Angka Harapan Hidup Maksimal} - \text{Angka Harapan Hidup Minimal}}$	BPS Kota Makassar
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	Perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	BPS Kota Makassar
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	Jumlah kematian ibu pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah pada waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	Jumlah kematian bayi usia 0 tahun (0-11 bulan) dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah pada waktu yang sama}} \times 1.000$	Bidang Kesehatan Masyarakat
5	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi Tuberkulosis	-	Jumlah penderita penyakit TB/tuberculosis yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam wilayah dan waktu tertentu dikalikan konstanta	$\frac{\text{Jumlah kasus TB yang ditemukan pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Prevalensi HIV	-	Banyaknya jumlah kasus baru HIV yang ditemukan dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	$\frac{\text{Jumlah kasus baru HIV yang ditemukan dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibandingkan seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di wilayah tertentu yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di wilayah tertentu dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	%	Persentase penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di wilayah tertentu yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di wilayah tertentu dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6	Menurunnya Masalah Gizi	Persentase Balita gizi Buruk	%	Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status berdasarkan Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) memiliki Z-score kurang dari -3 Standar Deviasi	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase Ballita Gizi Kurang	%	Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status berdasarkan Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi	$\frac{\text{Jumlah balita gizi kurang}}{\text{Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan}} \times 100\%$	Bidang Kesehatan Masyarakat

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Prevalensi Stunting	%	Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status berdasarkan Indeks Panjang Badan menurut Umur (P/UB) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi	$\frac{\text{Jumlah balita pendek}}{\text{Jumlah balita yang diukur}} \times 100\%$ <p>berat badan dan panjang/tinggi badan</p>	Bidang Kesehatan Masyarakat

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-2026



**B. Rencana Kinerja Tahun 2023**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT Tahun 2023 terkuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023:

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2023**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	-	0,806
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,2
3		Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	35,4
4		Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	1,25
5		Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi Tuberkulosis	-	0,2
			Prevalensi HIV	-	0,038
			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100
			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	%	100
6		Menurunnya Masalah Gizi	Persentase Balita gizi Buruk	%	1,54
			Persentase Ballita Gizi Kurang	%	5,79
			Prevalensi Stunting	%	6,80

Sumber: Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023



### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 secara rinci adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,806
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,2
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	-	35,4
4	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	-	1,25
5	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi Tuberkulosis	-	0,2
		Prevalensi HIV	-	0,038
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	%	100
6	Menurunnya Masalah Gizi	Persentase Balita gizi Buruk	%	1,54
		Persentase Ballita Gizi Kurang	%	5,79
		Prevalensi Stunting	%	6,80

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Adapun anggaran pada DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 adalah sebesar Rp 607.387.306.000,- (enam ratus tujuh

miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah). Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Makassar:

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90%	174.429.350.081
		PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	
		PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK	90%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan	100%	698.385.600
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan	100%	144.149.036.135
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	134.570.500
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	3 Jenis	671.500.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	1.630.381.1504



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	20.074.512.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Jenis	2.068.355.596
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Jenis	5.002.609.100
2	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%	422.032.302.219
		PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE BALITA MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PRODUKTIF YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA USIA LANJUT YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT YANG TERLAYANI KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH ( <i>HUMAN IMMUNODEFICIE NCY VIRUS</i> ) YANG MENDAPATKAN LAYANAN	100%	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46 Puskesmas	47.248.987.523
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Rumah Sakit	374.074.611.696
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianyaa Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	46 Puskesmas	429.448.000
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Rumah Sakit	279.255.000
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENDAPAT	90%	308.786.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS		
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin	100%	146.130.000
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Mendapat Pembinaan dan Pengawasan	10 Kegiatan	66.806.000
3.3	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan Mendapat Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100%	95.850.000
4	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN KEBUTUHAN FARMASI PADA RSUD DAN PUSKESMAS	100%	1.565.787.100
		PERSENTASE KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RSUD DAN PUSKESMAS	62%	
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikasi, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikasi, Usaha Mikro Obat Tradisional yang Memiliki Izin	100%	275.000.700



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
4.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tersedianya Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Produksi	10 PKRT	67.108.000
4.3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tersedianya Sarana P-IRT yang Memiliki Sertifikat	100%	465.898.400
4.4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tersedianya TPM yang Memiliki Sertifikat Laik Higiene	3265 Sarana	84.480.000
4.5	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	51.364.000
4.6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	621.936.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN	PERSENTASE POSYANDU AKTIF	100%	9.051.080.600
		CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF	50%	
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Posyandu	1013 Posyan-du	8.646.407.000
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6 Kegiatan	404.673.600

Sumber: DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Tanggal 24 Bulan September Tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Pada target kinerja tidak mengalami perubahan, perubahan terjadi pada alokasi anggaran program dan kegiatan yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 sebesar Rp 619.405.516.485,- (enam ratus sembilan belas miliar empat ratus lima juta lima ratus enam belas



ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Program dan Kegiatan**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 Perubahan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	90%	168.059.342.470
		PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%	
		PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK	90%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan	100%	573.590.400
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan	100%	137.653.071.424
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	126.370.500
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	3 Jenis	201.500.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	4.539.101.550



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	19.026.412.000
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Jenis	1.396.355.596
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Jenis	4.542.581.000
2	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	100%	437.912.280.115
		PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	100%	
		PERSENTASE BALITA MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PENDIDIKAN DASAR YANG	100%	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN		
		PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PRODUKTIF YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA USIA LANJUT YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT YANG TERLAYANI KESEHATAN	100%	
		PERSENTASE WARGA NEGARA TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN LAYANAN	100%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		KESEHATAN PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH ( <i>HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS</i> ) YANG MENDAPATKAN LAYANAN	100%	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46 Puskesmas	60.790.211.895
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Rumah Sakit	376.600.265.220
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianyaa Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	46 Puskesmas	339.948.000
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28 Rumah Sakit	181.855.000
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENDAPAT	90%	2.345.096.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS		
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin	100%	146.130.000
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Mendapat Pembinaan dan Pengawasan	10 Kegiatan	223.932.000
3.3	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan Mendapat Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100%	1.975.034.000
4	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN KEBUTUHAN FARMASI PADA RSUD DAN PUSKESMAS	100%	1.436.479.300
		PERSENTASE KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RSUD DAN PUSKESMAS	62%	
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang Memiliki Izin	100%	240.500.700

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
4.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tersedianya Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Produksi	10 PKRT	23.108.000
4.3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tersedianya Sarana P-IRT yang Memiliki Sertifikat	100%	446.604.600
4.4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tersedianya TPM yang Memiliki Sertifikat Laik Higiene	3265 Sarana	79.600.000
4.5	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	48.364.000
4.6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	598.302.000



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN	PERSENTASE POSYANDU AKTIF	100%	9.65.318.600
		CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF	50%	
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Posyandu	1013 Posyan- du	8.646.407.000
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6 Kegiatan	335.897.600
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	4 Kegiatan	670.014.000

Sumber: DPPA Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang bnerwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Makassar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Makassar.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Peringkat Kerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realiasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

*Sumber Data: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Makassar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Makassar.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja melalui perbandingan antara realisasi dengan target disajikan melalui penghitungan capaian. Untuk menghitung capaian, secara umum digunakan rumus-rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, digunakan rumus:



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Makassar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>0,806</b>	<b>0,806*</b>	<b>100%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>BPS Kota Makassar</b>
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,2	72,6	100,55%	Sangat Tinggi	BPS Kota Makassar
1.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	35,4	76,67	-16,58%	Sangat Rendah	Bidang Kesehatan Masyarakat
1.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,25	7,3	-384,00%	Sangat Rendah	Bidang Kesehatan Masyarakat
1.4	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	a. Prevalensi Tuberkulosis	0,20	0,45	-25,00%	Sangat Rendah	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		b. Prevalensi HIV	0,038	0,069	18,42%	Sangat Rendah	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		c. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		d. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1.5	Menurunnya Masalah Gizi	a. Persentase Balita Gizi Buruk	1,54%	0,29%	181,17%	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
		b. Prevalensi Balita Gizi Kurang	5,79%	1,83%	168,39%	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat
		c. Prevalensi Stunting	6,80%	3,14%	153,82%	Sangat Tinggi	Bidang Kesehatan Masyarakat

Sumber Data: Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023

\*Data Tahun 2022

Adapun analisis capaian kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah Indeks Kesehatan. Indeks kesehatan merupakan cerminan dari tingkat kesehatan di suatu wilayah. Indeks kesehatan disusun berdasarkan Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pada Tahun 2023, diperoleh realisasi 0,806 berdasarkan Data BPS Kota Makassar Tahun 2022. Untuk data Tahun 2023 belum dirilis/dipublikasi.

2. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH sebesar 72,6 artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir pada Tahun 2023 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 72,6 tahun.

3. Sasaran 2: Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator kinerja sasaran menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas. AKI dipengaruhi beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Pada Tahun 2023, jumlah ibu yang meninggal pada saat hamil, bersalin maupun nifas adalah 19 orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 24.782 sehingga diperoleh AKI sebesar 76,67.



Kasus kematian ibu ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti pendarahan pasca melahirkan, tekanan darah tinggi yang menyebabkan eklamsi (kelainan pada masa kehamilan, saat persalinan atau setelah persalinan), adanya infeksi dan/atau sepsis (komplikasi berbahaya akibat respons tubuh terhadap infeksi) hingga penyakit penyerta lainnya.

4. Sasaran 3: Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator kinerja sasaran menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup. AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada masa sebelum hamil, saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Pada tahun 2023, jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 (satu) tahun adalah sebanyak 181 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 24.782 sehingga diperoleh AKB sebesar 7,3.

5. Sasaran 4: Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator kinerja sasaran menurunnya penyakit menular dan tidak menular adalah prevalensi tuberkulosis, prevalensi HIV, pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan pelayanan kesehatan penderita pada Diabetes Mellitus (DM).

Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran menurunnya penyakit menular dan tidak menular dapat diurai sebagai berikut:

i. Prevalensi Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.

Pada tahun 2023, kasus penderita TB di Kota Makassar yang ditemukan dan diobati adalah sebanyak 6.608 orang dengan jumlah penduduk 1.463.809 jiwa sehingga diperoleh tingkat prevalensi



0,45 per 100 kasus. Target prevalensi TB tahun 2023 adalah 0,2 dan realisasinya adalah 0,45 sehingga capaian -25%.

Mulai tahun 2022, telah terbentuk Forum Multi Sektor Eliminasi Tuberkulosis (FMS-TB) Kota Makassar dengan ketuanya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar dengan melibatkan beberapa SKPD, pihak swasta/dunia usaha, organisasi profesi, komunitas/LSM/CSO, akademisi/ perguruan tinggi/asosiasi, serta media. Dengan adanya FMS-TBC ini diharapkan mampu mengakselerasi pencapaian TBC yaitu eliminasi TBC di Tahun 2030.

ii. Prevalensi HIV

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.

Pada tahun 2023, kasus positif HIV di Kota Makassar sebanyak 1.015 orang dengan jumlah penduduk 1.463.809 jiwa sehingga diperoleh tingkat prevalensi 0,069 per 1.000 kasus. Target prevalensi HIV tahun 2023 adalah 0,038 dan realisasinya adalah 0,069 sehingga diperoleh capaian 18,42%.

iii. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Definisi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 (lima) menit dalam keadaan cukup istirahat/tenang. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung coroner) dan otak (menyebabkan stroke) bila tidak dideteksi secara dini dan mendapat pengobatan yang memadai. Hipertensi juga sering disebut "*the silent killer*" karena sering tanpa keluhan.

Pada tahun 2023, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar di kota Makassar

adalah sebanyak 224.784 orang dengan jumlah perkiraan penderita hipertensi sebanyak 224.784, sehingga diperoleh persentase sebesar 100%.

iv. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)

DM (Diabetes mellitus) atau disebut diabetes saja merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia).

Terdapat 2 (dua) kategori utama DM yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 ditandai dengan kurangnya produksi insulin, sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh. Diabetes tipe 2 merupakan 90% dari seluruh diabetes. Sedangkan diabetes gestasional adalah hiperglikemia yang didapatkan pada saat kehamilan.

Pada tahun 2023, jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar di Kota Makassar adalah sebanyak 26.982 orang dengan jumlah sasaran penderita DM sebanyak 26.982, sehingga diperoleh persentase sebesar 100%.

Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki upaya tambahan berupa kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat diberi nama KECE HDR (Kenali dan Cegah Penyakit Hipertensi, Diabetes dan Rokok). Pada kegiatan KECE HDR dilakukan skrining kepada masyarakat utamanya yang berada di Lorong Wisata (inovasi Kota Makassar). Salah satu penyakit yang diskruining adalah penyakit DM.

6. Sasaran 5: Menurunnya Masalah Gizi

Indikator kinerja sasaran menurunnya masalah gizi adalah persentase balita gizi buruk, prevalensi balita gizi kurang dan prevalensi stunting.

Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran menurunnya masalah gizi dapat diurai sebagai berikut:

i. Persentase Balita Gizi Buruk



Gizi Buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi sangat kurus, disertai atau tidak edema pada kedua punggung kaki, berat badan menurut panjang badan atau berat badan dibanding tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi dan/atau lingkaran lengan atas kurang dari 11,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.

Status gizi buruk berbeda dengan kasus, dimana kasus sudah menunjukkan gejala klinis seperti marasmus/kwashiorkor dan perhitungan kasus didasarkan pada berat badan per tinggi badan.

Pada Tahun 2023, jumlah balita gizi buruk di Kota Makassar sebanyak 249 balita. Jumlah seluruh balita yang diukur adalah 87.165 balita, sehingga diperoleh persentase realisasi balita gizi buruk sebesar 0,29%. Dengan target 1,54%, sehingga diperoleh capaian sebesar 181,17%.

Pada beberapa kasus gizi buruk di Kota Makassar, masih ditemukan adanya balita dengan status gizi buruk yang merupakan warga pendatang atau bukan penduduk asli Makassar, mereka merupakan penduduk musiman yang orang tuanya bekerja sementara di Makassar seperti tukang atau buruh bangunan, sehingga balitanya ikut diukur status gizinya dan tercatat dalam pelaporan.

Balita yang mengalami gizi buruk akan diberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai program intervensi untuk meningkatkan status gizi anak untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik dengan umur anak tersebut. PMT yang diberikan adalah berupa makanan pabrik yaitu susu dan biskuit.

Adapun jika membutuhkan perawatan, semua kasus gizi buruk yang dilaporkan telah mendapat penanganan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun pada fasilitas kesehatan tingkat rujukan jika memerlukan perawatan lebih lanjut.

ii. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah keadaan gizi balita yang ditandai dengan kondisi kurus, berat badan menurut panjang badan atau tinggi

badan kurang dari -2 sampai dengan -3 standar deviasi, dan/atau lingkaran lengan 11,5-12,5 cm pada Anak usia 6-59 bulan.

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena di samping sebagai faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui.

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Body Mass Index (BMI) atau yang dikenal dengan Index Berat Badan adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penilaian status gizi Balita yang dilakukan dengan pengukuran tubuh (BB, TB) atau anthropometri untuk dibandingkan dengan umur.

Pada Tahun 2023, jumlah balita gizi kurang di Kota Makassar adalah 1.591 balita dari 87.165 seluruh balita yang diukur, sehingga diperoleh prevalensi sebesar 1,83%. Dengan target 5,79%, maka diperoleh capaian 168,4%.

Penanganan balita gizi kurang selalu menjadi perhatian setiap tahunnya agar kemungkinan terjadinya gizi buruk karena kasus gizi kurang yang tidak ditangani maksimal dapat dicegah, begitupun kasus gizi buruk yang sudah beralih ke gizi kurang dapat ditangani maksimal sehingga asupan gizi yang baik dapat diberikan sehingga berdampak pada semakin baiknya status gizi balita.

Balita yang mengalami gizi kurang juga akan diberikan PMT sebagai program intervensi untuk meningkatkan status gizi anak untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik dengan umur anak tersebut. PMT pemulihan gizi kurang bagi balita dilaksanakan dengan menyediakan susu selama seratus hari untuk setiap anak.

iii. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu



yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.

Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.

Pada Tahun 2023, jumlah balita yang diukur adalah 87.134 dan ditemukan 2.734 yang stunting, sehingga diperoleh prevalensi sebesar 3,14%. Dengan target 6,8%, maka diperoleh capaian 153,82%.

Faktor penyebab stunting karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan yang menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak. Selain itu pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan pada anak. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi, diantaranya faktor pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan diantara layanan asuhan kebidanan pada ibu hamil, juga tingkat kehadiran anak di posyandu, kurangnya akses ke makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi.

Pemerintah Kota Makassar berupaya melakukan percepatan penurunan stunting atau Makassar menuju *zero stunting* untuk 2024 dengan membuat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Makassar. Setiap hari Sabtu, diadakan gerebek stunting ke puskesmas-puskesmas. Tim yang hadir adalah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Kesehatan, Pihak Kecamatan dan Kelurahan.

Salah satu cara mencegah stunting yaitu pola hidup sehat serta seribu Hari Pertama Kelahiran (HPK) dimana saat ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya. Selain itu, cara lain untuk mencegah terjadinya stunting yakni memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri atau anak perempuan berusia 12 – 18 tahun. Pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dilakukan setiap hari Jumat dimana pihak puskesmas mendatangi sekolah untuk memberikan tablet tersebut. Sementara remaja putri yang tidak mengenyam bangku pendidikan pemberian tablet tambah darah dilakukan oleh kader kesehatan.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>0,806</b>	<b>0,806</b>	<b>100%</b>	<b>0,806</b>	<b>0,806*</b>	<b>100%</b>
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,1	72,4	100,42%	72,2	72,6	100,55%
1.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	42,17	78,84	13,04%	35,4	76,67	-16,58%
1.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,29	6,27	-286,05%	1,25	7,3	-384,00%
1.4	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	a. Prevalensi Tuberkulosis	0,20	0,27	65,00%	0,20	0,45	-25,00%
		b. Prevalensi HIV	0,04	0,074	19,51%	0,038	0,069	18,42%
		c. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	97,68%	97,68%	100%	100%	100%
		d. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	101,94%	101,94%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.5	Menurunnya Masalah Gizi	a. Persentase Balita Gizi Buruk	1,64%	1,34%	118,29%	1,54%	0,29%	181,17%
		b. Prevalensi Balita Gizi Kurang	6,05%	5,64%	106,78%	5,79%	1,83%	168,39%
		c. Prevalensi Stunting	6,90%	4,08%	140,87%	6,80%	3,14%	153,82%

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022-2023  
 \*Data Tahun 2022



Adapun analisis perbandingan capaian kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada Tahun 2023, diperoleh realisasi 0,806 berdasarkan Data BPS Kota Makassar Tahun 2022. Untuk data Tahun 2023 belum dirilis/dipublikasi.

2. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2023, target UHH adalah 72,2 dengan realisasi 72,6. Capaian tahun 2023 adalah 100,55% dan pada tahun 2022 juga sudah mencapai target dengan hasil persentase capaian 100,42% karena target 72,1 dan realisasi 72,4.

Peningkatan UHH dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan. Namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi UHH itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. UHH dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

3. Sasaran 2: Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

Capaian Tahun 2022 adalah 13,04% dengan target 42,17 dan realisasi 78,84. Pada Tahun 2022, jumlah ibu yang meninggal pada saat hamil, bersalin maupun nifas di Kota Makassar adalah 21 orang dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 26.636 sehingga diperoleh AKI sebesar 78,84. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang capaiannya -16,58%, capaian Tahun 2022 lebih tinggi yaitu 13,04%.

4. Sasaran 3: Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Capaian Tahun 2022 adalah -286,05% dengan target 1,29 dan realisasi 6,27. Pada tahun 2022, jumlah kematian bayi di Kota Makassar adalah sebanyak 167 dengan jumlah kelahiran hidup adalah 26.636 sehingga diperoleh AKB sebesar 6,34. Tahun 2023 memperoleh capaian -384% yang menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan perolehan capaian -286%.

5. Sasaran 4: Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular

Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran menurunnya penyakit menular dan tidak menular dapat diurai sebagai berikut:

i. Prevalensi Tuberkulosis

Capaian Tahun 2022 adalah 65% dengan target 0,2 dan realisasi 0,27. Pada Tahun 2022, jumlah penderita TBC adalah 3.902 orang dengan jumlah penduduk 1.463.809 sehingga diperoleh prevalensi TBC sebesar 0,27 per 100 kasus. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 yang capaiannya -25%, capaian Tahun 2022 lebih tinggi yaitu 65%.

ii. Prevalensi HIV

Target prevalensi HIV Tahun 2022 adalah 0,041 dan realisasinya adalah 0,074 per 100 kasus sehingga diperoleh capaian 19,51%. Menurunnya realisasi prevalensi HIV dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, yaitu dari 0,074 menjadi 0,069, disebabkan karena terjadi penurunan jumlah infeksi baru, dan tingginya angka kematian terkait HIV.

iii. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pada tahun 2022, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 293.548 orang dengan jumlah perkiraan penderita hipertensi adalah 300.530, sehingga diperoleh capaian sebesar 97,68%.

Adanya peningkatan capaian dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 yaitu dari 97,68% menjadi 100% karena Dinas Kesehatan Kota Makassar memiliki upaya tambahan berupa kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat diberi nama KECE HDR (Kenali dan Cegah Penyakit Hipertensi, Diabetes dan Rokok). Pada kegiatan KECE HDR dilakukan skrining kepada masyarakat utamanya yang berada di Lorong Wisata (inovasi Kota Makassar). Salah satu penyakit yang diskruining adalah penyakit hipertensi.

iv. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)

Pada Tahun 2022, jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Makassar adalah sebanyak 25.010 orang dengan jumlah sasaran penderita DM adalah sebanyak 24.533 orang, sehingga diperoleh capaian 101,94%. Dibandingkan dengan



capaian Tahun 2023 dengan persentase 100% sudah mencapai target tapi lebih rendah daripada capaian Tahun 2022 tapi dari segi jumlah orang yang dilayani meningkat dari 24.533 orang di Tahun 2022 menjadi 26.982 orang di Tahun 2023.

6. Sasaran 5: Menurunnya Masalah Gizi

Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran menurunnya masalah gizi dapat diurai sebagai berikut:

i. Persentase Balita Gizi Buruk

Pada Tahun 2022, jumlah balita gizi buruk di Kota Makassar sebanyak 988 balita. Jumlah seluruh balita yang diukur adalah 73.720 balita, sehingga diperoleh persentase realisasi balita gizi buruk sebesar 1,34%. Terjadi penurunan temuan balita gizi buruk pada Tahun 2023 menjadi 249 balita dari 87.165 seluruh balita yang diukur, sehingga capaian meningkat dari 118,29% di Tahun 2022 menjadi 181,17% di Tahun 2023.

ii. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Pada Tahun 2022, jumlah balita gizi kurang di Kota Makassar adalah 4.157 balita dari 73.720 seluruh balita yang diukur, sehingga diperoleh prevalensi sebesar 5,64%. Terjadi penurunan temuan balita gizi kurang pada Tahun 2023 menjadi 1.591 balita dari 87.165 seluruh balita yang diukur, sehingga capaian meningkat dari 106,78% di Tahun 2022 menjadi 168,4% di Tahun 2023.

iii. Prevalensi Stunting

Pada tahun 2022, jumlah balita yang diukur adalah 81.638 dan ditemukan 3.333 yang stunting, sehingga diperoleh prevalensi sebesar 4,08%. Terjadi penurunan temuan balita stunting pada Tahun 2023 menjadi 2.734 dari 87.134 yang diukur, sehingga prevalensinya 3,14%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-2026 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>0,806*</b>	<b>0,812</b>	<b>99,26%</b>
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,6	72,5	100,14%
1.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	76,67	19,21	-199,12%
1.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	7,3	0,86	-648,84%
1.4	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	a. Prevalensi Tuberkulosis	0,45	0,18	-50,00%
		b. Prevalensi HIV	0,069	0,029	-37,93%
		c. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%
		d. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	100%	100%
1.5	Menurunnya Masalah Gizi	a. Persentase Balita Gizi Buruk	0,29%	1,22%	176,23%
		b. Prevalensi Balita Gizi Kurang	1,83%	4,99%	163,33%
		c. Prevalensi Stunting	3,14%	6,50%	151,69%

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2023

\*Data Tahun 2022

Adapun analisis perbandingan capaian kinerja pada tabel di atas adalah sebagai berikut:



1. Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat  
Pada Tahun 2023, diperoleh realisasi 0,806 berdasarkan Data BPS Kota Makassar Tahun 2022. Memperoleh tingkat kemajuan sebesar 99,26% jika dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yaitu 0,812.
2. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan  
Pada tahun 2023, diperoleh realisasi 72,6 yang sudah melebihi target akhir jangka menengah yaitu 72,5 sehingga kemajuannya melebihi 100%.
3. Sasaran 2: Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)  
Realisasi AKI Tahun 2023 yang sebesar 76,67 masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan di Tahun 2026 yang sebesar 19,21. Tingkat kemajuannya mencapai angka -199,12%. Data realisasi AKI merupakan capaian negatif, apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik.
4. Sasaran 3: Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)  
Realisasi AKB Tahun 2023 yang sebesar 7,3 pun juga masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan di Tahun 2026 yang sebesar 0,86. Tingkat kemajuannya justru bergerak ke arah negatif yaitu -648,84%. Data realisasi AKB juga merupakan capaian negatif.
5. Sasaran 4: Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular  
Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran menurunnya penyakit menular dan tidak menular dapat diurai sebagai berikut:
  - i. Prevalensi Tuberkulosis  
Realisasi prevalensi TBC Tahun 2023 sebesar 0,45% masih belum mencapai target jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar 0,18%. Data realisasi prevalensi TBC juga merupakan capaian negatif.
  - ii. Prevalensi HIV  
Realisasi prevalensi HIV Tahun 2023 sebesar 0,069 masih belum mencapai target jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar 0,029. Data realisasi prevalensi HIV juga merupakan capaian negatif.



iii. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Realisasi pelayanan kesehatan penderita hipertensi Tahun 2023 sebesar 100% sudah sesuai dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang capaian idealnya harus 100%.

iv. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)

Realisasi pelayanan kesehatan penderita DM Tahun 2023 sebesar 100% sudah sesuai dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar sebesar 100%. Pelayanan kesehatan penderita DM merupakan salah satu indikator dalam SPM bidang kesehatan yang capaian idealnya harus 100%.

6. Sasaran 5: Menurunnya Masalah Gizi

Penjelasan masing-masing indikator kinerja sasaran menurunnya masalah gizi dapat diurai sebagai berikut:

i. Persentase Balita Gizi Buruk

Realiasi sasaran menurunnya masalah gizi dengan indikator persentase balita gizi buruk pada Tahun 2023 adalah 0,29%, jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan nilai 1,22% memperoleh tingkat kemajuan lebih dari 100% yaitu 176,23%. Data realisasi persentase balita gizi buruk juga merupakan capaian negatif.

ii. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Realiasi sasaran menurunnya masalah gizi dengan indikator persentase balita gizi kurang pada Tahun 2023 adalah 1,83%, jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan nilai 4,99% memperoleh tingkat kemajuan yang juga lebih dari 100% yaitu 163,33%. Data realisasi persentase balita gizi kurang juga merupakan capaian negatif.

iii. Prevalensi Stunting

Realiasi sasaran menurunnya masalah gizi dengan indikator prevalensi stunting pada Tahun 2023 adalah 3,14%, jika dibandingkan dengan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan nilai 6,50%

memperoleh tingkat kemajuan yang juga lebih dari 100% yaitu 151,69%.  
 Data realisasi prevalensi stunting juga merupakan capaian negatif.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standard nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	STANDAR NASIONAL	PERSEN- TASE CAPAIAN
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,806*	0,812	99,26%
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,6	73,93	98,20%
1.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	76,67	305	174,86%
1.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	7,3	16,85	156,68%
1.4	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	a. Prevalensi Tuberkulosis	0,45	0,35	71,43%
		b. Prevalensi HIV	0,069	0,18	161,67%
		c. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%
		d. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	100%	100%	100%
1.5	Menurunnya Masalah Gizi	a. Persentase Balita Gizi Buruk	0,29%	7,70%**	196,23%
		b. Prevalensi Balita Gizi Kurang	1,83%	17,10%*	189,30%
		c. Prevalensi Stunting	3,14%	21,60%*	185,46%

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2023

\*Data Tahun 2022

\*\*Data Tahun 2022 dan data wasting (balita kurus)

*\*\* Pada skala nasional, tidak lagi mengukur persentase balita gizi buruk atau balita sangat kurus. Pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat empat permasalahan gizi balita di Indonesia. Diantaranya stunting, wasting atau kurus, underweight atau gizi kurang, dan overweight atau kegemukan*

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penuruna kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
<b>1</b>	<b>Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>0,806</b>	<b>0,806*</b>	<b>100%</b>	Indeks kesehatan mengacu kepada empat pilar kesehatan individual, yaitu fisik, mental, lingkungan dan sosial	Tetap mempertahankan bahkan meningkatkan indeks kesehatan yang telah tercapai saat ini
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,2	72,6	100,55%	Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita	Mempertahankan bahkan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi UHH, berupa factor social maupun ekonomi, seperti: keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat
1.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	35,4	76,67	-16,58%	- Kasus kematian ibu ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti pendarahan pasca melahirkan, tekanan darah tinggi yang menyebabkan eklamsi (kelainan pada masa kehamilan, saat persalinan atau setelah persalinan),	- Memaksimalkan edukasi terhadap masyarakat khususnya kepada perempuan (calon ibu ataupun ibu hamil) dan keluarga tentang pentingnya memeriksakan kehamilan selama masa kehamilan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						<p>adanya infeksi dan/atau sepsis (komplikasi berbahaya akibat respons tubuh terhadap infeksi) hingga penyakit penyerta lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan saat ini dilakukan secara online, dimana fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit melaporkan lewat aplikasi secara online</li> <li>- Rujukan Terpadu (SISRUTE) belum berjalan maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlunya melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait pencatatan yang dilakukan secara online</li> <li>- Perlunya peningkatan kapasitas petugas dalam menangani pasien yang akan dirujuk misalnya melakukan stabilisasi sebelum dirujuk</li> </ul>
1.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	1,25	7,3	-384,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasus kematian bayi dipengaruhi sejumlah faktor seperti asfiksia, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), serta ada kelainan bayi bawaan yang membuat bayi meninggal dunia saat baru dilahirkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaksimalkan edukasi terhadap masyarakat khususnya kepada perempuan (calon ibu ataupun ibu hamil) dan keluarga tentang pentingnya memeriksakan kehamilan selama masa kehamilan untuk mendeteksi secara dini</li> </ul>



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencatatan saat ini dilakukan secara online, dimana fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit melaporkan lewat aplikasi secara online</li> <li>- Pola hidup masyarakat khususnya perempuan dalam menyiapkan dirinya menjadi ibu misalnya mengatur pola makan dengan mengurangi atau tidak mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan yang kurang mengandung nilai gizi</li> <li>- 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu sering/banyak) yang tinggi saat ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kelainan atau penyakit yang mungkin ada pada janin yang bisa menyebabkan komplikasi</li> <li>- Perlunya melakukan koordinasi dan klarifikasi terkait pencatatan yang dilakukan secara online</li> <li>- Perlunya dukungan keluarga dan masyarakat dalam memaksimalkan kesehatan ibu sejak sebelum hamil hingga melahirkan, selain itu juga membantu dalam edukasi pentingnya siap berkeluarga (hamil dan memiliki anak) untuk calon pengantin</li> </ul>
1.4	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	a. Prevalensi Tuberkulosis	0,20	0,45	-25,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke FKTP seperti Puskesmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan dilakukan penemuan kasus secara aktif oleh kader Puskesmas dan kader Kelurahan</li> </ul>



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masalah sosial demografi dan ekonomi seperti adanya stigma, kurangnya dukungan keluarga dan kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan akibat biaya, jarak dan transportasi</li> <li>- Pemahaman dan persepsi masyarakat yang kurang akurat terkait Tuberkulosis</li> <li>- Adanya efek dari konsumsi obat sehingga terjadinya putus obat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan serta ketersediaan sumber daya manusia (konselor)</li> <li>- Memaksimalkan Forum Multi Sektor Eliminasi Tuberkulosis (FMS-TB) Kota Makassar yang terbentuk sejak Tahun 2022 dan melibatkan beberapa SKPD, pihak swasta/dunia usaha, organisasi profesi, komunitas/LSM/CSO, akademisi/ perguruan tinggi/asosiasi, serta media</li> </ul>
		b. Prevalensi HIV	0,038	0,069	18,42%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor pendukung ditemukannya kasus baru HIV adalah dengan adanya upaya tambahan berupa kegiatan pemeriksaan skrining HIV secara mobile yang dilakukan di tempat-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain mengumpulkan data dari layanan kesehatan primer, juga mengambil data dari layanan kesehatan rujukan yang telah berprogram</li> <li>- Perkembangan terkini</li> </ul>

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						tempat berisiko ( <i>hotspot</i> ) seperti tempat hiburan malam, panti pijat, dll. - Berdasarkan faktor risiko, penyebab terbesar penularan di Indonesia adalah hubungan seksual beresiko pada hateroseksual, diikuti hubungan seks homoseksual dan penggunaan jarum suntik bergantian - Penyebab utama penyebaran virus HIV, yakni melalui hubungan seksual yang berisiko	dalam kebijakan dan kemajuan dalam pengobatan pencegahan diharapkan dapat mengurangi prevalensi dan kejadian infeksi HIV - Melibatkan populasi kunci (pengguna narkoba, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, perempuan transgender/waria dan pekerja seks komersial) dalam melakukan penjangkauan melalui pendekatan tes tradisional seperti konseling dan tes sukarela di layanan kesehatan terdekat - Memaksimalkan program notifikasi pasangan, dimana jika ditemukan 1 orang dengan status HIV reaktif maka pasangannya disarankan untuk memeriksakan diri juga



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		c. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini hipertensi</li> <li>- Kepatuhan serta pemahaman dalam menjalankan terapi yang baik dapat mempengaruhi tekanan darah dan secara bertahap mencegah terjadinya komplikasi. Pasien yang menjalani terapi dengan teratur lebih mungkin untuk mencapai target tekanan darah yang normal dalam jangka yang panjang. Kontrol hipertensi yang lebih baik dan kepatuhan yang lebih besar dapat dikaitkan dengan kualitas hidup yang lebih tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya tambahan berupa kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat diberi nama KECE HDR (Kenali dan Cegah Penyakit Hipertensi, Diabetes dan Rokok) dengan melakukan skrining kepada masyarakat utamanya yang berada di Lorong Wisata (inovasi Kota Makassar). Salah satu penyakit yang diskriming adalah penyakit hipertensi</li> <li>- Petugas kesehatan dan keluarga penderita perlu melakukan pemantauan kepada para penderita hipertensi agar lebih mematuhi segala aturan mengenai terapi hipertensi</li> </ul>
		d. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini diabetes mellitus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya tambahan berupa kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat diberi nama KECE HDR</li> </ul>

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		Mellitus				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberhasilan dari program manajemen penyakit kronis tidak lepas dari kemampuan individu dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi dan pelayanan kesehatan untuk membuat keputusan tentang perawatannya yang dikenal dengan <i>Health Literacy</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(Kenali dan Cegah Penyakit Hipertensi, Diabetes dan Rokok) dengan melakukan skrining kepada masyarakat utamanya yang berada di Lorong Wisata (inovasi Kota Makassar). Salah satu penyakit yang diskriming adalah penyakit DM.</li> <li>- Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan penderita DM salah satunya dengan mengetahui <i>Health Literacy</i> yang dimiliki</li> </ul>
1.5	Menurunnya Masalah Gizi	a. Persentase Balita Gizi Buruk	1,54%	0,29%	181,17%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada beberapa kasus gizi buruk di Kota Makassar, masih ditemukan adanya balita dengan status gizi buruk yang merupakan warga pendatang atau bukan penduduk asli Makassar, mereka merupakan penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan melalui penemuan dini dan memobilisasi masyarakat serta penanganan sesuai dengan tata laksana kasus, yang terintegrasi baik dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap</li> </ul>



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						<p>musiman yang orang tuanya bekerja sementara di Makassar seperti tukang atau buruh bangunan, sehingga balitanya ikut diukur status gizinya dan tercatat dalam pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan balita gizi buruk dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang</li> <li>- Penyiapan kesehatan dan status gizi ibu hamil dilakukan sejak masa remaja dan selanjutnya saat usia subur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balita yang mengalami gizi buruk akan diberikan pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai program intervensi untuk meningkatkan status gizi anak untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik dengan umur anak tersebut. PMT yang berikan adalah berupa makanan pabrik yaitu susu dan biskuit</li> <li>- Penentuan status gizi buruk pada balita perlu dilakukan pemeriksaan yang meliputi pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan, Lingkar Lengan Atas (LiLA), pemeriksaan fungsi hati atau ginjal</li> </ul>

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		b. Prevalensi Balita Gizi Kurang	5,79%	1,83%	168,39%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan balita gizi kurang selalu menjadi perhatian setiap tahunnya agar kemungkinan terjadinya gizi buruk karena kasus gizi kurang yang tidak ditangani maksimal dapat dicegah, begitupun kasus gizi buruk yang sudah beralih ke gizi kurang dapat ditangani maksimal sehingga asupan gizi yang baik dapat diberikan sehingga berdampak pada semakin baiknya status gizi balita</li> <li>- Penyebab gizi kurang antara lain pemberian ASI Eksklusif yang tidak maksimal, pemberian susu formula secara dini, pemberian Makanan Pendamping (MP) ASI yang belum tepat (kurang variasi atau kurang gizi), pemanfaatan pelayanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balita yang mengalami gizi kurang juga akan diberikan PMT sebagai program intervensi untuk meningkatkan status gizi anak untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik dengan umur anak tersebut. PMT pemulihan gizi kurang bagi balita dilaksanakan dengan menyediakan susu selama seratus hari untuk setiap anak</li> <li>- Memaksimalkan edukasi terkait program penatalaksanaan balita gizi kurang serta pemberian konseling sesuai penyebab gizi kurang</li> </ul>



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						<p>kesehatan ibu pada balita yang belum baik (tidak rutin ke Posyandu, imunisasi tidak lengkap) serta tidak menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</p>	
		c. Prevalensi Stunting	6,80%	3,14%	153,82%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor penyebab stunting karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan yang menjadi penyebab terbesar kondisi stunting pada anak</li> <li>- Pola asuh yang kurang efektif juga menjadi salah satu penyebab stunting. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan pada anak</li> <li>- Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi, diantaranya faktor pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan di antara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan percepatan penurunan stunting atau Makassar menuju <i>zero stunting</i> untuk 2024 dengan membuat Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Makassar</li> <li>- Memaksimalkan edukasi pola hidup sehat serta seribu Hari Pertama Kelahiran (HPK) dimana saat ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya</li> <li>- Pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri atau anak perempuan berusia 12 – 18 tahun</li> </ul>

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
						layanan asuhan kebidanan pada ibu hamil, juga tingkat kehadiran anak di posyandu, kurangnya akses ke makanan bergizi dan kurangnya akses air bersih dan sanitasi	

Sumber Data: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2023



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja diuraikan pada penjelasan berikut:

1. Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja indeks kesehatan yang memiliki target 0,806 dan realisasi 0,806 sehingga capaiannya adalah 100% di Tahun 2023 ini didukung oleh semua program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Makassar.

2. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) dengan target 72,2 tahun dan realisasi 72,6 tahun sehingga diperoleh capaian 100,55% di Tahun 2023 ini ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**  
**Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE ASN PERANGKAT DAERAH YANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS	111,11%
	PERSENTASE KETERSEDIAAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	100%
	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KONDISI BAIK	96,77%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan	100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>% Capaian</b>
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,08%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	100%
	PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	100%
	PERSENTASE BALITA MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PRODUKTIF YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA LANJUT YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT YANG TERLAYANI KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH ( <i>HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS</i> ) YANG MENDAPATKAN LAYANAN	100%
	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	105,38%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11,89%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianyaa Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MENDAPAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	111,11%
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Mendapat Pembinaan dan Pengawasan	100%
Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	Sumber Daya Manusia Kesehatan Mendapat Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi	100%

*Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023*

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencakup 3 indikator yaitu:

- (1) Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja perangkat daerah
  - (2) Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik.
  - (3) Persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas
- Adapun persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, dari target 90% diketahui realisasi 87,09% dengan tingkat pencapaian realisasi terhadap target sebesar 97%. Terkait persentase ASN perangkat daerah yang mendapat peningkatan kapasitas diperoleh realisasi sebesar 100% dari target 90% sehingga persentase capaian 111%. Sedangkan pada persentase ketersediaan laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah dari target yang

ditetapkan sebesar 100% di peroleh realisasi sebesar 100% sehingga didapatkan capaian realisasi sebesar 100%. Perhitungan indikator tersebut berdasarkan capaian pada sub kegiatan pendukung antara lain capaian sub kegiatan tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan memperhitungkan rincian kegiatan yang mendukung adalah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

**Faktor penghambat :**

- Adanya penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) beberapa puskesmas yang berpengaruh terhadap proses pencairan anggaran.
- Tidak tersedia jaringan untuk penambahan instalasi/ daya listrik pada dua puskesmas sementara telah dianggarkan pada perubahan
- Belum dilakukan penghapusan beberapa asset khususnya kendaraan sementara sudah tidak fungsional lagi

**Faktor pendukung :**

- Koordinasi dengan Puskesmas berjalan dengan baik khususnya terkait pelaporan kinerja, data kepegawaian maupun pelaporan keuangan.
- Terbentuknya tim verifikasi dengan pembagian tugas yang jelas

**Tindak lanjut :**

- Mengusulkan segera pada tahun berikutnya, pejabat defenitif untuk Puskesmas
- Percepatan proses penambahan daya/instalasi listrik pada beberapa puskesmas
- Pengusulan penghapusan asset untuk yang sudah tidak fungsional atau kendaraan yang sudah tidak beroperasi

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat memuat 13 indikator yaitu :

- Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan



- Persentase usia produktif 15 – 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase orang dengan resiko tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
- Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan

Capaian indikator cakupan Jaminan Kesehatan Nasional sampai dengan bulan Desember 2023 tercatat sebesar 100,11% dari target 95%, sehingga diperoleh capaian 105,38%. Dari sejumlah 1.463.980 jiwa penduduk, yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/ JKN sejumlah 1.464.401 orang, dengan perincian kepesertaan sebagai berikut:

- PBI APBN = 332.562 peserta
- PBI APBD = 228.895 peserta
- PPU (Pekerja Penerima Upah: ASN, TNI, POLRI, Pekerja Swasta, BUMN dan BUMD) = 296.726 peserta
- PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah / Pekerja Informal) = 364.293
- BP (Bukan Pekerja : Investor, pemberi kerja, veteran, perintis kemerdekaan dan pensiunan) = 66.341 peserta.

Adapun terkait 12 indikator lainnya yang juga merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal, capaian pada sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil, dari sejumlah 27.999 sasaran ibu hamil, yang telah mendapatkan pelayanan pada Tahun 2023 sejumlah 27.999 atau 100%.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin, capaian pada tahun 2023 sebesar 100%, telah dilayani sejumlah 24.777 ibu bersalin dari sasaran sejumlah 24.777 ibu.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dari sasaran sejumlah 24.782 pada Tahun 2023, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sejumlah 24.782 atau 100%.
4. Pelayanan kesehatan balita, dari target capaian sasaran sebanyak 102.196, sasaran yang telah capai adalah sebanyak 102.196 atau sebesar 100% balita yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan.
5. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar akan dilakukan pengukuran sampai dengan Tahun 2023, dari sejumlah 185.828 sasaran, yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sejumlah 185.828 diperoleh capaian sebesar 100%.
6. Pelayanan kesehatan usia 15-59 tahun, dari sejumlah 600.680 sasaran, yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sejumlah 600.680 atau 100% dari target sebesar 100%.
7. Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan, diperoleh capaian sebesar 100% pada Tahun 2023, dengan sejumlah 122.461 usia lanjut mendapatkan skrining kesehatan dari sejumlah 122.461 sasaran.
8. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan diperoleh capaian pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan sejumlah 224.784 penderita hipertensi yang dilayani dari sejumlah 224.784 sasaran.
9. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan diperoleh capaian pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan sejumlah 26.982 penderita DM yang dilayani dari sejumlah 26.982 sasaran.
10. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan, telah dilayani sejumlah 3.258 ODGJ dari sejumlah 3.258 sasaran atau 100%.



11. Persentase orang dengan resiko Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan, diperoleh capaian pada Tahun 2023 100% dengan sejumlah 52.848 yang dilayani dari sejumlah 52.848 sasaran..

Persentase orang dengan resiko HIV mendapatkan pelayanan kesehatan, dari sejumlah 46.655 sasaran, yang telah dilayani sejumlah 46.655 atau 100%.

**Faktor pendorong:**

- Koordinasi yang berjalan baik dengan lintas sektor, termasuk dengan BPJS kesehatan dan perangkat daerah terkait
- Kemampuan masyarakat mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri
- Tersedianya format pelaporan bagi tiap program
- Ketersediaan data sarana yang akan diawasi/dibina
- Mulai terbangunnya pelaporan secara online dari seluruh puskesmas
- Telah terbentuk TPCB (Tim Pembina Cluster Binaan) yang melibatkan lintas program dinas untuk membina langsung ke puskesmas
- Akses informasi terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin luas
- Tersedianya dana hibah
- Banyak dukungan anggaran dari luar
- Kerjasama lintas sektor berjalan dengan baik
- Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas petugas
- Masyarakat antusias mendukung program pemerintah
- Program berjalan dengan baik dan kerjasama lintas sektor

**Faktor penghambat:**

- Proses validasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran /PBI APBD yang cukup memakan waktu lama sehingga berita acara rekon tertunda yang berdampak pada pembayaran iuran tidak tepat waktu
- SK gubernur terkait penetapan kuota bantuan dana sharing yang tidak tepat waktu
- Adanya perubahan harga pada beberapa produk obat dan bahan medis habis pakai sehingga proses pengadaan terhambat dan melalui proses perubahan rincian pada DPA

- Terdapat beberapa alat kesehatan seperti untuk sirkum yang kurang memadai
- Kurangnya tenaga terlatih terkait asuhan mandiri toga dan akupresure di puskesmas
- Update data yang kurang valid dari beberapa puskesmas pada aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan (aspak)
- Penyesuaian rincian pada DPA Parsial/ terdapat revisi pada DPA
- Adanya Perubahan harga yang tiba-tiba di E-Catalog
- Pengusulan perubahan harga membutuhkan waktu yang lama

**Tindak lanjut:**

- Melakukan koordinasi dengan pihak berwenang terkait proses validasi data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran /PBI APBD
- Melakukan koordinasi terkait penetapan kuota bantuan dana sharing dengan Pemerintah Provinsi
- Melakukan perencanaan dan penghitungan kebutuhan serta pengadaan alat kesehatan yang sudah tidak memadai
- Membuat perencanaan dan penghitungan kebutuhan tenaga terlatih terkait asuhan mandiri toga dan akupresur di puskesmas, serta membuat pelatihannya
- Perbaiki sistem Pelaporan
- Anggaran direalisasikan sesuai penawaran

Indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan yaitu : Persentase sumber daya kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis dengan target 85% dengan realisasi 100% pada Tahun 2023, terdapat sejumlah 9 tenaga kesehatan yang melanjutkan pendidikan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga yang bertanggung jawab dan kewenangan harus terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengawasan dengan melakukan monitoring data tenaga kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan organisasi profesi dan kredensialing atau proses untuk melihat pemenuhan standar dan mengukur apakah telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dilakukan tim Dinas Kesehatan bersama BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial).



**Faktor pendorong:**

- Kredensialing dengan BPJS tetap berjalan
- Kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan
- Dilaksanakannya uji kompetensi bagi tenaga kesehatan oleh Dinas Kesehatan

**Faktor penghambat:**

- Tenaga kesehatan belum sepenuhnya memiliki kualifikasi dan kompetensi
- Belum rampungnya pemetaan kebutuhan pelatihan untuk masing-masing jenis ketenagaan puskesmas
- Keterbatasan anggaran bersumber pada APBD untuk pelatihan – pelatihan perjenis profesi tenaga kesehatan

**Tindak lanjut:**

- Pengawasan yang lebih intens lagi bagi sarana pelayanan kesehatan
- Setiap fasilitas pelayanan kesehatan agar membuat sistem yang dapat memunculkan notifikasi atau pengingat untuk mengetahui SIP (Surat Izin Praktek) Petugas yang akan habis masa berlakunya
- Penjadwalan pelatihan bagi tenaga kesehatan sesuai bidang keilmuan
- Mengusulkan pelatihan – pelatihan melalui APBD

3. Sasaran 2: Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator kinerja sasaran menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2023, target 35,4 dan realisasi 76,67 diperoleh capaian -16,58% yang ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**  
**Sasaran Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	100%
	PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	100%
	PERSENTASE BALITA MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PRODUKTIF YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA LANJUT YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT YANG TERLAYANI KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH ( <i>HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS</i> ) YANG MENDAPATKAN LAYANAN	100%
	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	105,38%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN	PERSENTASE POSYANDU AKTIF	100%
	CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF	140,04%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Posyandu	100%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	100%

*Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023*

**Faktor pendorong:**

- Mulai terbangunnya pelaporan secara online dari seluruh puskesmas
- Akses informasi terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin luas
- Masuk dalam program SPM

- Tersedianya Alat Pemeriksaan
- Banyak dukungan anggaran dari luar
- Kerjasama lintas sektor berjalan dengan baik
- Semua puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta melakukan program HIV (salah satu program triple eliminasi yang melakukan skrining pada ibu hamil)

**Faktor penghambat:**

- Sistem Pelaporan belum maksimal (maintenance)
- Terkendala Penginputan (Jaringan dan Waktu)

**Tindak lanjut:**

- Perbaiki sistem Pelaporan

Indikator kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mencakup 2 indikator yaitu: persentase posyandu aktif dan cakupan bayi mendapat ASI Eksklusif.

Capaian indikator posyandu aktif yaitu 100% dengan jumlah posyandu se kota Makassar adalah 1012 dengan rincian sebanyak 453 posyandu purnama dan 559 posyandu mandiri dengan sejumlah 5060 kader.

Adapun cakupan bayi yang mendapatkan Asi Eksklusif adalah 70,02% dengan sejumlah 14.832 bayi yang masih memperoleh ASI eksklusif dari sejumlah 15.911 bayi yang direcall.

**Faktor pendorong:**

- Tersedianya anggaran untuk operasional/ transport kader posyandu
- Terdapat format pelaporan rutin kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Tersedianya SDM tenaga Kesehatan sebagai penanggungjawab Posyandu dimasing-masing 47 puskesmas

**Faktor penghambat:**

- Masih adanya keterlambatan pelaporan dari puskesmas
- Kualitas SDM Kesehatan yang belum merata khususnya di puskesmas

**Tindak lanjut:**

- Melakukan kesepakatan waktu terkait penyampaian pelaporan rutin dari penanggungjawab di puskesmas
- Peningkatan monitoring dan evaluasi di puskesmas



4. Sasaran 3: Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator kinerja sasaran menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2023, target 1,25 dan realisasi 7,3 diperoleh capaian -384% yang ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.9**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**  
**Sasaran Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	100%
	PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	100%
	PERSENTASE BALITA MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PRODUKTIF YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA LANJUT YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT YANG TERLAYANI KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH ( <i>HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS</i> ) YANG MENDAPATKAN LAYANAN	100%
	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	105,38%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN	PERSENTASE POSYANDU AKTIF	100%
	CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF	140,04%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Posyandu	100%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	100%

*Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023*

**Faktor pendorong:**

- Mulai terbangunnya pelaporan secara online dari seluruh puskesmas
- Tersedianya anggaran untuk dukungan pelayanan seperti untuk pengadaan strip gula darah, dll
- Akses informasi terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin luas
- Masuk dalam program SPM
- Tersedianya Alat Pemeriksaan
- Banyak dukungan anggaran dari luar
- Kerjasama lintas sektor berjalan dengan baik
- Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas petugas
- Dukungan anggaran

**Faktor penghambat:**

- Adanya pergantian atau mutasi pengelola program di puskesmas
- Sistem Pelaporan belum maksimal (maintenance)
- Terkendala Penginputan (Jaringan dan Waktu)

**Tindak lanjut:**

- Koordinasi dengan Puskesmas terkait pergantian atau mutasi pengelola program
- Perbaiki sistem Pelaporan

5. Sasaran 4: Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular

Indikator kinerja sasaran menurunnya penyakit menular dan tidak menular adalah prevalensi tuberculosis dengan capaian -25%, prevalensi HIV, dengan capaian 18,42%, pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dengan capaian 100% dan pelayanan kesehatan penderita pada Diabetes Mellitus (DM) dengan capaian 100% yang ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**  
**Sasaran Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	100%
	PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	100%
	PERSENTASE BALITA MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PRODUKTIF YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA LANJUT YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT YANG TERLAYANI KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH ( <i>HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS</i> ) YANG MENDAPATKAN LAYANAN	100%
	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	105,38%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%

*Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023*

**Faktor pendorong:**

- Tersedianya format pelaporan bagi tiap program
- Ketersediaan data sarana yang akan diawasi/ dibina
- Mulai terbangunnya pelaporan secara online dari seluruh puskesmas
- Tersedianya anggaran untuk dukungan pelayanan seperti untuk pengadaan strip gula darah, dll
- Adanya kerjasama dengan instansi lain seperti BNN (Badan Narkotika), jejaring laboratorium, dll

- Akses informasi terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin luas
- Masuk dalam program SPM
- Tersedianya alat pemeriksaan Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Tersedianya Strip Gula Darah dan Alat Pemeriksaan Diabetes Melitus
- Dukungan dari lintas sektor pada program Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat berjalan baik
- Tersedianya bahan pemeriksaan NARKOBA
- Kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Unit Kesehatan Sekolah
- Maraknya Media Sosial sebagai media informasi mendorong terlaksananya Indikator Program Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
- Masyarakat lebih mudah mengakses Informasi tentang KTR
- Tersedianya dana hibah
- Banyak dukungan anggaran dari luar
- Kerjasama lintas sektor berjalan dengan baik
- Semua puskesmas, rumah sakit pemerintah dan swasta melakukan program HIV
- Program edukasi dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik sehingga kasus DBD menurun
- Tersedianya Reagen dan mikroskop pemeriksaan malaria
- Tersedianya anggaran peningkatan kapasitas petugas
- Masyarakat antusias mendukung program pemerintah
- Dukungan anggaran
- Dukungan Kebijakan dan kerjasama Lintas sektor
- Tersedianya Anggaran SKDR dan Verifikasi sinyal/Alert

**Faktor penghambat:**

- Sistem Pelaporan belum maksimal (maintenance)
- Terkendala Penginputan (Jaringan dan Waktu)
- Kurangnya jejaring dengan Fasilitas Kesehatan lain sehingga capaian SPM Hipertensi tidak maksimal
- Banyak Pasien Diabetes Melitus Lost Follow Up obat karena kurangnya pemahaman masyarakat



- Kurangnya sosialisasi kepada dokter poli tentang pemberian obat pasien ODGJ
- Kurangnya kesadaran masyarakat baik penderita, keluarga terkait stigma TB
- Belum semua layanan testing HIV mampu melakukan pengobatan HIV
- Kurangnya serapan anggaran karena menurunnya kasus DBD (Foging fokus dan BBM beberapa tidak dicairkan)
- Penemuan kasus malaria kurang, karena tidak dilakukan pemeriksaan sediaan darah
- Masih ditemukan masyarakat yang belum melengkapi vaksinasi/imunisasi saat endemi
- Masyarakat masih ada yang khawatiran Kejadian Ikutan pasca Imunisasi (KIPI)
- Masih ada rasa takut petugas melakukan imunisasi ganda
- Belum semua Rumah Sakit menerapkan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) Online
- Anggaran Verifikasi Alert masih kurang

**Tindak lanjut:**

- Perbaiki sistem Pelaporan
- kedepannya akan dilakukan kerjasama dengan fasilitas Kesehatan (Klinik) untuk program Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Terus dilakukan edukasi pada masyarakat terkait Diabetes Melitus
- Dokter di Puskesmas bisa memberi obat kepada pasien ODGJ selama obat tersedia
- Dilakukan skrining terkait penyalahgunaan narkoba di sekolah
- Akan dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait TB
- Pengembangan layanan pengobatan HIV
- Dilaksanakan sesuai laporan kasus masyarakat
- Dilakukan pemeriksaan sediaan darah pada masyarakat dari daerah endemik
- Perlu peningkatan edukasi pentingnya vaksinasi/Imuisasi agar terjaga Herd Immunity
- Peningkatan Edukasi program dan langkah awal bila terjadi dugaan KIPI

- Mengupayakan semua Rumah sakit menerapkan SKDR secara online

6. Sasaran 5: Menurunnya Masalah Gizi

Indikator kinerja sasaran menurunnya masalah gizi adalah persentase balita gizi buruk dengan capaian 181,17%, prevalensi balita gizi kurang dengan capaian 168,39% dan prevalensi stunting dengan capaian 153,82% yang ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan seperti yang disebutkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.11**  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**  
**Sasaran Menurunnya Masalah Gizi**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE IBU HAMIL MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	100%
	PERSENTASE IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	100%
	PERSENTASE BALITA MENDAPAT LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA PRODUKTIF YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA USIA LANJUT YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA HIPERTENSI YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA PENDERITA DIABETES MELLITUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT YANG TERLAYANI KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN	100%
	PERSENTASE WARGA NEGARA DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH ( <i>HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS</i> ) YANG MENDAPATKAN LAYANAN	100%
	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	105,38%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN KEBUTUHAN FARMASI PADA RSUD DAN PUSKESMAS	93,68%
	PERSENTASE KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA RSUD DAN PUSKESMAS	89,4%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikasl, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikasl, Usaha Mikro Obat Tradisional yang Memiliki Izin	100%
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tersedianya Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Produksi	100%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tersedianya Sarana P-IRT yang Memiliki Sertifikat	100%
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tersedianya TPM yang Memiliki Sertifikat Laik Higiene	100%
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%

*Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023*

Indikator kinerja program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terdiri dari :

- Persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada RSUD dan Puskesmas.
- Persentase ketersediaan kebutuhan alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas

Terkait persentase ketersediaan kebutuhan farmasi pada RSUD dan Puskesmas selama tahun 2023 hingga triwulan IV, RSUD dan puskesmas telah melakukan belanja obat dan Bahan Habis Pakai/ BHP untuk memenuhi kebutuhan farmasi baik melalui penganggaran APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mekanisme BLUD dan dana JKN, dengan capaian persentase ketersediaan kebutuhan farmasi (obat dan bahan habis pakai) pada triwulan keempat adalah 93,68% dari target 100%, nilai tersebut merupakan rata-rata capaian ketersediaan kebutuhan farmasi di seluruh puskesmas dan pada RSUD dengan rincian : persentase ketersediaan kebutuhan obat di puskesmas sebesar 87,90% dan BMHP sebesar 90,20%, adapun pada RSUD untuk obat persentase ketersediaan sebesar 96,66% dan BMHP 100%. Ketersediaan obat yang direncanakan Dinas Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan puskesmas, terealisasi 109 item jenis obat dari 124 item jenis obat yang direncanakan atau 87,90%. Untuk bahan habis pakai Puskesmas, dari 102 item jenis yang direncanakan terealisasi sejumlah 92 item atau 90,19%. Pada RSUD, di Tahun 2023 direncanakan pengadaan 509 jenis obat dan dapat dipenuhi sejumlah 492 jenis atau 96,66% dan untuk Bahan Medis Habis Pakai/BMHP dari yang direncanakan oleh RSUD sejumlah 575 jenis, seluruhnya atau 100% terealisasi atau dapat dipenuhi.

Adapun pengukuran indikator persentase ketersediaan alat kesehatan pada RSUD dan puskesmas dengan target 60%, diperoleh capaian 55,43%. Berdasarkan data pada aplikasi sarana, prasarana dan alat Kesehatan (Aspak), ketersediaan alat kesehatan pada seluruh puskesmas diketahui 56,83% dan persentase ketersediaan alat kesehatan rumah sakit sebesar 54,03% (sesuai data pada aspak) sehingga jika dihitung rata-rata persentase ketersediaan alat kesehatan pada RSUD dan Puskesmas sampai triwulan keempat tahun 2023 adalah 55,43%.

Berbagai faktor yang menjadi kendala maupun pendukung pencapaian program serta rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan dan pencapaian indikator pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yaitu :

**Faktor pendorong:**

- Tersedianya obat di E-Catalog
- Adanya format yang menjadi patokan dalam menentukan jenis obat
- Adanya RKO dan RKAI
- Adanya RKBHP dari PKM

**Faktor penghambat:**

- Beberapa toko alat kesehatan salah dalam pemilihan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
- Kesulitan berkomunikasi dengan beberapa pemilik Perbekalan Rumah Tangga/ PRT dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga/ PKRT
- Sebagian besar alat pengadaan 2023 belum terdistribusi ke PKM sehingga perubahan pada aplikasi ASPAK belum signifikan.
- Beberapa jenis sediaan farmasi yang tidak dibelajarkan karena adanya kenaikan harga pada E-Catalog.
- Jumlah stok obat yang ada di RSUD yang banyak
- Ada sejumlah obat yang tidak tayang di E-Catalog
- Terlambatnya terbit DPA sehingga menghambat proses pengadaan
- Adanya perubahan harga yang tidak terduga pada e-catalog
- Untuk mengusulkan perubahan harga yang diakibatkan perubahan harga pada E-Catalog itu membutuhkan waktu yang lama



**Tindak lanjut:**

- Pelaksanaan kegiatan visitasi sarana PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga) saat ada pengajuan baru
- Konfirmasi melalui telepon kepada PRT PKRT dan diarahkan untuk mengganti KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
- Melakukan koordinasi dengan Puskesmas terkait distribusi barang dan pelaporan ASPAK
- Melakukan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terkait pengadaan yang tertunda ataupun yang tidak terlaksana
- Melakukan pengusulan penyesuaian harga dan rincian pada DPA parsial maupun perubahan

**B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	168.059.342.470	158.960.886.842	94,59%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	573.590.400	548.974.101	95,71%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.653.071.424	130.056.454.827	94,48%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	126.370.500	109.395.000	86,32%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	201.500.000	175.123.700	86,91%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.539.101.550	4.023.369.400	88,64%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.026.412.000	19.018.800.000	99,96%

No	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.396.355.596	1.189.994.529	85,22%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.542.581.000	3.838.775.285	79,23%
2	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	437.912.280.115	372.085.178.033	84,97%
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	60.790.211.895	36.368.970.553	59,83%
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	376.600.265.220	335.367.919.401	89,05%
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	339.948.000	213.329.080	62,75%
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	181.855.000	134.959.000	74,21%
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.345.096.000	1.764.993.710	75,26%
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	146.130.000	65.776.500	45,01%
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	223.932.000	181.358.500	80,99%



No	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3.3	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	1.975.034.000	1.517.858.710	76,85%
4	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.436.479.300	1.273.678.472	88,67%
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	240.500.700	213.521.460	88,78%
4.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	23.108.000	15.863.00	68,65%
4.3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	446.604.600	413.488.812	92,58%
4.4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	79.600.000	72.422.000	90,98%
4.5	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	48.364.000	47.440.000	98,09%

No	Program/Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
4.6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	598.302.000	510.943.200	85,40%
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.652.318.600	9.068.130.027	93,95%
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.646.407.000	8.259.266.600	95,52%
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335.897.600	302.110.227	89,94%
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	670.014.000	506.753.200	75,63%

Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 yang menunjang pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90%	100%	111,11%	103,36%	168.059.342.470	158.960.886.842	94,59%	1,09	E
		100%	100%	100%						
		90%	89,07%	98,97%						
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	100%	573.590.400	548.974.101	95,71%	1,04	E
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	100%	137.653.071.424	130.056.454.827	94,48%	1,06	E
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	100%	126.730.500	109.395.000	86,32%	1,16	E
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	99,08%	99,08%	99,08%	201.500.000	175.123.700	86,91%	1,14	E
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	100%	4.539.101.550	4.023.369.400	88,64%	1,13	E
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	100%	19.026.412.000	19.018.800.000	99,96%	1,00	I

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	100%	1.396.355.596	1.189.994.529	85,22%	1,17	E
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	100%	4.542.581.000	3.838.775.285	84,51%	1,18	E
2	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	100%	100,00%	100,49%	437.912.280.115	372.085.178.034	84,97%	1,18	E
		100%	100%	100,00%						
		100%	100%	100,00%						
		100%	100%	100,00%						
		100%	100%	100,00%						
		100%	100%	100,00%						
		100%	100%	100,00%						
		100%	100%	100,00%						
		100%	100%	100,00%						
		95%	100,11%	105,38%						
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%	11,89%	11,89%	11,89%	60.790.211.895	36.368.970.553	59,83%	0,20	TE



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
2.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100,00%	100%	376.600.265.220	335.367.919.401	89,05%	1,12	E
2.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100%	100%	100,00%	100%	339.948.000	213.329.080	62,75%	1,59	E
2.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100,00%	100%	181.855.000	134.959.000	74,21%	1,35	E
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	90%	100%	111,11%	111,11%	2.345.096.000	1.764.993.710	75,26%	1,48	E
3.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	100%	146.130.000	65.776.500	45,01%	2,22	E

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	100%	223.932.000	181.358.500	80,99%	1,23	E
3.3	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	100%	100%	100,00%	100%	1.975.034.000	1.517.858.710	76,85%	1,30	E
4	SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	93,68%	93,68%	91,54%	1.436.479.300	1.273.678.472	88,67%	1,03	E
		62%	55,43%	89,40%						
4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikasi, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	100%	100,00%	100%	240.500.700	213.521.460	88,78%	1,13	E



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
4.2	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100%	100%	100,00%	100%	23.108.000	15.853.000	68,60%	1,46	E
4.3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	100%	100,00%	100%	446.604.600	413.488.812	92,58%	1,08	E

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) **2023**  
 Dinas Kesehatan Kota Makasar

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
4.4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%	100%	100,00%	100%	79.600.000	72.422.000	90,98%	1,10	E
4.5	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100%	100%	100,00%	100%	48.364.000	47.440.000	98,09%	1,02	E
4.6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	100%	100,00%	100%	598.302.000	510.943.200	85,40%	1,17	E
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KESEHATAN	100%	100%	100,00%	120,02%	9.652.318.600	9.068.130.027	93,95%	1,28	E
		50%	70,02%	140,04%						



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI	
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RATA-RATA % CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
5.1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	100%	8.646.407.000	8.259.266.600	95,52%	1,05	E
5.2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	100%	335.897.600	302.110.227	89,94%	1,11	E
5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	100%	670.014.000	506.753.200	75,63%	1,32	E

Sumber Data: Laporan Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023

Keterangan: - Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka tidak efisien (TE)

- Jika tingkat efisiensi sama dengan 1, maka impas (I)

- Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari 1, maka efisien (E)

Dari 5 program dan 24 kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023, 5 program dan 22 kegiatan memiliki hasil tingkat efisiensi yang efisien. Adapun 2 kegiatan lainnya yaitu 1 kegiatan memiliki tingkat efisiensi yang sama dengan 1 yang berarti impas yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan 1 kegiatan lainnya memiliki tingkat efisiensi yang kurang dari 1 (tidak efisien) yaitu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan persentase capaian kinerja 11,89% dan capaian anggaran 59,83%. Kegiatan yang tidak efisien tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Tidak terlaksananya sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi pada 1.969 unit yang direncanakan akan dikalibrasi pada Tahun 2023;
2. Sub kegiatan Pengadaan Obat Vaksin memiliki realisasi kinerja 87,90% dan realisasi keuangan 53,87%;
3. Sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai memiliki realisasi kinerja 90,20% dan realisasi keuangan 74,68%.



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan kinerja ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Makassar menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 11 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu indeks kesehatan dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu usia harapan hidup dengan capaian kinerja sebesar 100,55% (kategori sangat tinggi)
- Sasaran menurunnya angka kematian ibu yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja sebesar -16,58% (kategori sangat rendah)
- Sasaran menurunnya angka kematian bayi yang terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu angka kematian bayi dengan capaian kinerja sebesar -384% (kategori sangat rendah)
- Sasaran menurunnya penyakit menular dan tidak menular yang terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu prevalensi tuberkulosis dengan capaian kinerja sebesar

-25% (kategori sangat rendah), prevalensi HIV dengan capaian kinerja sebenar 18,42% (kategori sangat rendah), pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian kinerja 100% (kategori sangat tinggi) dan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan capaian kinerja 100% (kategori sangat tinggi)

- Sasaran menurunnya masalah gizi yang terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu persentase balita gizi buruk dengan capaian kinerja 181,17% (kategori sangat tinggi), prevalensi balita gizi kurang dengan capaian kinerja 168,39% (kategori sangat tinggi) dan prevalensi stunting dengan capaian kinerja 153,82% (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran dengan 10 indikator kinerja, terdapat 4 indikator kinerja yang capaiannya sangat rendah dan 6 indikator kinerja yang capaiannya sangat tinggi. Secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 619.405.516.485,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 543.152.867.085,- dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 serapan anggaran sebesar 87,69% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,12.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Makassar.

Makassar, Februari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar



**dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes**  
NIP. 19730112 200604 2 012



# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto**  
Jabatan : Walikota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

PIHAK KEDUA

  
Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto

PIHAK PERTAMA

  
dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	72.2
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	35.4
3	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	1.25
4	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	a. Prevalensi Tuberkulosis b. Prevalensi HIV c. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi d. Pelayanan Kesehatan Penderita DM	0.2% 0.038% 100% 100%
5	Menurunnya Masalah Gizi	a. Persentase Balita Gizi Buruk b. Prevalensi Balita Gizi Kurang c. Prevalensi Stunting	1.54% 5.79% 6.80%

Makassar, Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar

  
**dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19730112 200604 2 012

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 174.429.350.081,-	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 422.032.302.219,-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 308.786.000,-	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 1.565.787.100,-	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan	Rp. 9.051.080.600,-	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 607.387.306.000,-</b>	

Makassar, Januari 2023

**WALIKOTA MAKASSAR**

Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR**

dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes**  
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto**  
Jabatan : Walikota Makassar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto

PIHAK PERTAMA

dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	72.2
2	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	35.4
3	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	1.25
4	Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular	a. Prevalensi Tuberkulosis b. Prevalensi HIV c. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi d. Pelayanan Kesehatan Penderita DM	0.2% 0.038% 100% 100%
5	Menurunnya Masalah Gizi	a. Persentase Balita Gizi Buruk b. Prevalensi Balita Gizi Kurang c. Prevalensi Stunting	1.54% 5.79% 6.80%

Makassar, Oktober 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar

  
**dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19730112 200604 2 012



<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 169.059.342.470,-	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 437.912.280.115,-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 2.345.096.000,-	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 1.436.479.300,-	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan	Rp. 9.652.318.600,-	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 619.405.516.485,-</b>	

Makassar, Oktober 2023

**WALIKOTA MAKASSAR**



Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR**



dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS KESEHATAN

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221

*email: [dimkeskotamakassar@yahoo.co.id](mailto:dimkeskotamakassar@yahoo.co.id)*

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

Nomor : 14.1/Dinkes/440/I/TAHUN 2022

#### T E N T A N G

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

#### KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease*(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006)
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5);



25. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022- 2026;

26. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026**

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2021-2026;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2022-2026;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a k a s s a r

Pada tanggal, Januari 2022

  
**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR**  
**dr. Nutsaldah Sirajuddin, M.Kes**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19730112 200604 2 012

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 - 2026**

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan / Rumus Perhitungan
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	BPS	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{Angka Harapan Hidup} - \text{Angka Harapan Hidup Minimal}}{\text{Angka Harapan Hidup Maksimal} - \text{Angka Harapan Hidup Minimal}}$
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	BPS	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
3	Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	<p>Jumlah kematian ibu pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup.</p> $\text{AKI} = \frac{\text{Jumlah Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama}} \times 100.000$
4	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	<p>Jumlah Kematian Bayi usia 0 tahun (0-11 bulan) dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu.</p> $\text{AKB} = \frac{\text{Jumlah Bayi Usia 0 - 11 bulan yang meninggal dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama}} \times 1000$
5	Menurunnya Penyakit Menular dan tidak Menular	Prevalensi Tuberkulosis	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan	<p>Jumlah penderita penyakit TB/ Tuberkulosis yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam wilayah dan waktu tertentu dikalikan konstanta.</p> $\text{Prevalensi TB} = \frac{\text{Jumlah kasus TB yang ditemukan pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$

No.	Tujuan/ Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan / Rumus Perhitungan
		Prevalensi HIV	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan	<p>Banyaknya jumlah kasus baru HIV yang ditemukan dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.</p> $\text{Prevalensi HIV} = \frac{\text{Jumlah Kasus baru HIV yang ditemukan dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk dsuatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$
		Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan	<p>Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan dibandingkan seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas</p> $\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Penderita Hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di wilayah tertentu yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah tertentu dalam kurun waktu tahun yang sama}} \times 100\%$
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan	<p>Persentase penderita Diabetes Mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun</p> $\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Penderita Diabetes Mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun di wilayah tertentu yang mendapat pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penderita Diabetes Mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah tertentu dalam kurun waktu tahun yang sama}} \times 100\%$
6	Menurunnya masalah gizi	Persentase balita gizi buruk	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	<p>Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan menurut Umur (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -3 Standar Deviasi</p> $\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan}} \times 100\%$
		Prevalensi balita gizi kurang	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	<p>Anak umur 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan menurut Umur (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi</p>



No.	Tujuan/ Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan / Rumus Perhitungan
				<p>Rumus = <math>\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Kurang}}{\text{Jumlah balita yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan}} \times 100\%</math></p>
		Prevalensi Stunting	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	<p>Anak umur 0 - 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD</p> <p>Rumus = <math>\frac{\text{Jumlah balita pendek}}{\text{Jumlah balita yang diukur panjang/ tinggi badan}} \times 100\%</math></p>



Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

dr. Nursal Bah Sirajuddin, M.Kes

MIR. KD. 19730112 200604 2 012





makassar I MC



**Piagam Penghargaan**

DIBERIKAN KEPADA

**Inovasi JAMPANGI**

(Jangkauan Maksimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terintegrasi)

(RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR)

SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH  
ATAS PARTISIPASINYA DALAM LOMBA INOVASI DAERAH  
**INNOVATIVE MAYOR AWARD (IMA) 2022**  
KATEGORI

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

MAKASSAR, 8 DESEMBER 2022  
WALIKOTA MAKASSAR



MOH. RAMDHAN POMANTO





*Piagam Penghargaan*

DIBERIKAN KEPADA

**INOVASI PENTAS JUMAT**

**(Pelayanan Kesehatan Tanpa Batas Menuju Makassar Makin Sehat)**

**DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR**

**SEBAGAI JUARA I  
PADA LOMBA INOVASI DAERAH  
INNOVATIVE MAYOR AWARD (IMA) 2023**

**MAKASSAR, 7 NOVEMBER 2023**

**WALIKOTA MAKASSAR**



**MOR. RAMDHAN POMANTO**





makassar I MC



*Piagam Penghargaan*

DIBERIKAN KEPADA

**INOVASI JAMPANGI ANAKTA**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAYA KOTA MAKASSAR

SEBAGAI JUARA II  
PADA LOMBA INOVASI DAERAH  
**INNOVATIVE MAYOR AWARD (IMA) 2023**

MAKASSAR, 7 NOVEMBER 2023  
WALIKOTA MAKASSAR



Moh. Hamdhan Pomanto



**Tabel IV.1 (T-C.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar**  
**Tahun 2021 - 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	0.804	0.806	0.808	0.810	0.812
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5
		Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	42.17	35.4	28.63	21.87	19.21
		Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	1.29	1.25	0.91	0.88	0.86
		Menurunnya Penyakit Menular dan tidak Menular	Prevalensi Tuberkulosis	0.2	0.2	0.188	0.185	0.18
			Prevalensi HIV	0.041	0.038	0.035	0.032	0.029
			Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%
			Pelayanan kesehatan penderita DM	100%	100%	100%	100%	100%
		Menurunnya masalah gizi	Persentase balita gizi buruk	1.64%	1.54%	1.43%	1.32%	1.22%
			Prevalensi balita gizi kurang	6.05%	5.79%	5.51%	5.26%	4.99%
			Prevalensi Stunting	6.90%	6.80%	6.70%	6.60%	6.50%



**Tabel 6.1. (T.C-27)**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Kesehatan Kota Makassar**  
**Tahun 2022 - 2026**

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%	Rp 141,012,779,675	90%	Rp 151,340,391,700	100%	Rp 161,366,069,200	100%	Rp 160,692,056,650	100%	Rp 254,366,609,350	100%	Rp 323,999,815,225		
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%			
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1.02.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun															
1.02.01	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 Dokumen	Rp 103,000,000	2 Dokumen	Rp 103,000,000	2 Dokumen	Rp 103,000,000	2 Dokumen	Rp 103,000,000	2 Dokumen	Rp 103,000,000	10 Dokumen	Rp 515,000,000	Subag perencanaan	Kota Makassar
1.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun		1 Dokumen	Rp 23.500.000	1 Dokumen	Rp 23.000.000	1 Dokumen	Rp 23.000.000	1 Dokumen	Rp 23.000.000	1 Dokumen	Rp 23.000.000	5 Dokumen	Rp 115.500.000	Subag perencanaan	Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI																						
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra																									
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.																								
(3)			(4)			(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)	
1	02103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	5	Rp 100.000.000	Subag perencanaan	Kota Makassar																				
1	02104	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD		1	Rp 15.010.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	6	Rp 75.010.000	Subag perencanaan	Kota Makassar																				
1	02105	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD		1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	7	Rp 50.000.000	Subag perencanaan	Kota Makassar																				
1	02106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		150	Rp 129.200.000	150	Rp 130.000.000	150	Rp 130.000.000	150	Rp 130.000.000	150	Rp 130.000.000	150	Rp 130.000.000	750	Rp 649.200.000	Subag perencanaan	Kota Makassar																				
		Jumlah peserta Rapat Kerja Kesehatan Daerah		150		150		150		150		150		150		750																							
1	02107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	Rp 392.350.000	3	Rp 336.000.000	3	Rp 336.000.000	3	Rp 336.000.000	3	Rp 336.000.000	3	Rp 336.000.000	15	Rp 1.736.350.000	Subag perencanaan	Kota Makassar																				
1	02102	<b>Administrasi Keuangan</b>																																					
1	02102	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14	Rp 130.679.590.850	14	Rp 131.641.335.300	14	Rp 132.612.924.800	14	Rp 133.593.974.250	14	Rp 140.273.672.950	14	Rp 147.287.356.600	70	Rp 147.287.356.600	Subag Keuangan	Kota Makassar																				
1	02102	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		13	Rp 1.318.920.000	13	Rp 1.287.720.000	13	Rp 1.287.720.000	13	Rp 1.287.720.000	13	Rp 1.287.720.000	13	Rp 1.287.720.000	65	Rp 1.287.720.000	Subag Keuangan	Kota Makassar																				



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan Pelaksanaan Verifikasi yang disiapkan		12 Dokumen	Rp 403.812.800	12 Dokumen	Rp 553.878.800	12 Dokumen	Rp 553.878.800	12 Dokumen	Rp 553.878.800	12 Dokumen	Rp 553.878.800	60 Dokumen	Rp 553.878.800	Subag Keuangan	Kota Makassar
1.02.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun		1 Laporan	Rp 18.023.000	1 Laporan	Rp 18.053.000	1 Laporan	Rp 18.053.000	1 Laporan	Rp 18.053.000	1 Laporan	Rp 1.895.565.000	5 Laporan	Rp 1.895.565.000	Subag Keuangan	Kota Makassar
1.02.02.05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola		6 Dokumen	Rp 4.623.000	6 Dokumen	Rp 4.653.000	6 Dokumen	Rp 4.653.000	6 Dokumen	Rp 4.653.000	6 Dokumen	Rp 488.565.000	30 Dokumen	Rp 488.565.000	Subag Keuangan	Kota Makassar
1.02.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun															
1.02.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun		13 Laporan	Rp 12.919.000	13 Laporan	Rp 12.998.000	13 Laporan	Rp 12.998.000	13 Laporan	Rp 12.998.000	13 Laporan	Rp 12.998.000	65 Laporan	Rp 12.998.000	Subag Keuangan	Kota Makassar
1.02.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Anggaran Pelaporan Prognosis Realisasi yang disusun															
1.02.02.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>																
1.02.02.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah peserta pertemuan penyusunan barang milik daerah		47 Orang	Rp 8.067.000	47 Orang	Rp 11.000.000	47 Orang	Rp 12.100.000	47 Orang	Rp 13.350.000	47 Orang	Rp 1.401.750.000	235 Orang	Rp 1.401.750.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah jasa pengamanan internal kantor Dinkes Kota Makassar		8 Orang	Rp. 189.500.000	8 Orang	Rp. 272.600.000	8 Orang	Rp. 284.200.000	8 Orang	Rp. 299.600.000	8 Orang	Rp. 314.580.000	40 Orang	Rp. 314.580.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah																
1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																
1.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																
1.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																
1.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																
1.02.01.2.04.05	Pengelolaan Data Retribusi Daerah																
1.02.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.02.00.204.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	
1.02.00.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
1.02.00.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		165 stel	Rp 99.000.000	165 stel	Rp 99.000.000	165 stel	Rp 107.250.000	165 stel	Rp 107.250.000	165 stel	Rp 107.250.000	825 stel	Rp 519.750.000		Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.00.205.09	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Formal		52 Orang	Rp 487.500.000	52 Orang	Rp 487.500.000	52 Orang	Rp 507.500.000	52 Orang	Rp 507.500.000	52 Orang	Rp 53.287.500.000	260 Orang	Rp 55.277.500.000		Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.00.205.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi				100 Orang	Rp 91.250.000	100 Orang	Rp 91.250.000	100 Orang	Rp 91.250.000	100 Orang	Rp 9.581.250.000	400 Prang	Rp 9.855.000.000		Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.00.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jasa administrasi umum yang tersedia																
1.02.00.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		11 Jenis	Rp 47.686.700	11 Jenis	Rp 142.000.000	11 Jenis	Rp 145.000.000	11 Jenis	Rp 150.000.000	11 Jenis	Rp 157.500.000	55 Jenis	Rp 642.186.700		Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.01.208.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		63 unit	Rp 653.125.000			63 unit	Rp 9.675.000.000	63 unit	Rp 8.528.000.000	63 unit	Rp 8.954.400.000	252 unit	Rp 27.810.525.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.01.208.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan		15 unit	Rp 135.312.500	40 unit	Rp 335.000.000	25 unit	Rp 8.408.000.000	25 unit	Rp 8.078.000.000	25 unit	Rp 8.481.900.000	25 unit	Rp 25.438.212.500	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		25 Jenis	Rp 78.005.625	25 Jenis	Rp 85.800.000	25 Jenis	Rp 95.000.000	25 Jenis	Rp 105.000.000	25 Jenis	Rp 110.250.000	25 Jenis	Rp 474.055.625	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		18 Jenis	Rp 199.860.000	18 Jenis	Rp 158.000.000	18 Jenis	Rp 169.000.000	18 Jenis	Rp 170.000.000	18 Jenis	Rp 17.850.000.000	18 Jenis	Rp 18.546.860.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan		8 Jenis	Rp 19.680.000	8 Jenis	Rp 21.000.000	8 Jenis	Rp 22.000.000	8 Jenis	Rp 23.000.000	8 Jenis	Rp 2.415.000.000	8 Jenis	Rp 2.500.680.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi		106 kali	Rp 750.000.000	106 kali	Rp 1.005.000.000	106 kali	Rp 1.005.000.000	106 kali	Rp 1.005.000.000	106 kali	Rp 1.005.000.000	106 kali	Rp 4.770.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1.02.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																		
1.02.01.207	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		1 Unit	Rp 377.000.000			1 Unit	Rp 370.000.000	1 Unit	Rp 370.000.000	1 Unit	Rp 370.000.000	1 Unit	Rp 370.000.000			Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.01.207	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas lapangan yang diadakan				2 unit mobil e PCR	Rp 10.000.000.000	1 Unit kendaraan lapangan	Rp 400.000.000										
1.02.01.207	Pengadaan Mebel	Jumlah meubel yang diadakan			50 unit kursi dan meja kerja, 4 unit lemari, 20 unit kursi rapat, 10 meja rapat		Rp 444.000.000			1 paket	Rp 752.000.000	1 paket	Rp 752.000.000	1 paket	Rp 752.000.000	1 paket	Rp 752.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar
1.02.01.207	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat dan Mesin yang diadakan																	
1.02.01.208	Pengadaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.01.208	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan		4 Orang	Rp 14.400.000	4 Orang	Rp 28.800.000	4 Orang	Rp 28.800.000	4 Orang	Rp 33.600.000	4 Orang	Rp 33.600.000	4 Orang	Rp 153.600.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar		
1.02.01.208	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Bulan	Rp 698.012.000	12 Bulan	Rp 707.000.000	12 Bulan	Rp 717.000.000	12 Bulan	Rp 730.000.000	12 Bulan	Rp 730.000.000	12 Bulan	Rp 3.601.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar		
1.02.01.208	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 paket	Rp 725.000.000	1 paket	Rp 725.000.000	1 paket	Rp 725.000.000	1 paket	Rp 725.000.000	1 paket	Rp 3.625.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar		
1.02.01.208	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Penyediaan tim advokasi umum, penyediaan sewa gedung puskesmas, Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		1 paket, 4 unit, 72 Item 12 Bulan 12 Bulan	Rp 860.911.000	72 Item 12 Bulan 12 Bulan	Rp 900.000.000	1 paket, 4 unit, 72 Item 12 Bulan 12 Bulan	Rp 900.000.000	1 paket, 4 unit, 72 Item 12 Bulan 12 Bulan	Rp 925.000.000	1 paket, 4 unit, 72 Item 12 Bulan 12 Bulan	Rp 950.000.000	1 paket, 4 unit, 72 Item 12 Bulan 12 Bulan	Rp 4.575.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Kota Makassar		
1.02.01.209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																		
1.02.01.209	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala		1 Unit	Rp 285.656.600	1 Unit	Rp 40.000.000	1 Unit	Rp 45.000.000	1 Unit	Rp 50.000.000	1 Unit	Rp 55.000.000	1 Unit	Rp 435.656.600	Subag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan		



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10202092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Jasa pemeliharaan/izin kendaraan yang dikeluarkan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala		228 unit	Rp 812.924.600	228 unit	Rp 1.291.053.600	228 unit	Rp 1.409.741.600	228 unit	Rp 1.545.229.600	228 unit	Rp 1.545.229.600	228 unit	Rp 5.313.125.400	Subag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan
1020906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		1 paket	Rp 179.190.000	1 paket	Rp 165.000.000	1 paket	Rp 170.000.000	1 paket	Rp 175.000.000	1 paket	Rp 180.000.000	1 paket	Rp 704.190.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan
1020909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala		1 paket	Rp 72.000.000	1 paket	Rp 619.750.000	1 paket	Rp 200.000.000	1 paket	Rp 200.000.000	1 paket	Rp 210.000.000	1 paket	Rp 682.000.000	Subag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan
10202	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</b>	94%	95%	Rp 462,110,841,776	95%	Rp 780,420,165,213	96%	Rp 614,647,587,820	97%	Rp 644,905,166,226	97%	Rp 641,988,003,578	97%	Rp 2,493,783,070,115		
		<b>Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan</b>	92,38%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		<b>Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan</b>	100,00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	97,51%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan	77,76%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan	25,17%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase orang usia produktif 15 - 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan	35,99%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61,48%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,28%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61,39%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,07%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Persentase Orang dengan resiko Tuberculosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	022.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kota Makassar yang disediakan															
1	022.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung RS yang dibangun	1 RSUD & 1 paket (AMDAL, Study Kelayakan & Perencanaan)	Rp 10,000,000,000	2 Paket (2 RS)	Rp 200,000,000,000											
1	022.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 PKM	Rp 11,197,564,400	3 PKM	16,648,380,000	4 PKM	14,245,130,000	3 PKM	20,162,060,000			4 PKM			Bidang Yankes	Kota Makassar
1	022.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun			2 Paket	Rp 6,500,000,000	2 Paket	Rp 6,500,000,000	2 Paket	Rp 6,500,000,000		Rp 6,500,000,000				Bidang Yankes	Kota Makassar
1	022.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun															



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI												
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra															
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.														
(3)				(4)				(5)				(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	0 2 2	0 2 2	2. 0 1	0 5	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun		2 Rumah Sakit	10,474,73 9,000	1 Rumah Sakit	80,000,00 0,000	1 Rumah Sakit	78,947,330, 000	1 Rumah Sakit	78,947,330, 000	1 Rumah Sakit	78,947,33 0,000	1 Rumah Sakit	78,947,330 ,000	Bidang Yankes	Kota Mak assar								
1	0 2 2	0 2 2	2. 0 1	0 6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun																							
1	0 2 2	0 2 2	2. 0 1	0 7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat pengembangan																							
1	0 2 2	0 2 2	2. 0 1	0 8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang mendapat rehabilitasi dan pemeliharaan																							
1	0 2 2	0 2 2	2. 0 1	0 9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat rehabilitasi dan pemeliharaan				10 Puske smas	Rp 5.000.000. 000	10 Puske smas	Rp 5.000.000. 000	10 Puske smas	Rp 5.000.00 0.000	10 Puske smas	Rp 5.000.000 .000	Bidang Yankes	Kota Mak assar										
1	0 2 2	0 2 2	2. 0 1	1 0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat rehabilitasi dan pemeliharaan				1 Paket	Rp 10.000.00 0.000	1 Paket	Rp 10.000.00 0.000					Rp 10.000.00 0.000	Bidang Yankes	Kota Mak assar									
1	0 2 2	0 2 2	2. 0 1	1 1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang mendapat rehabilitasi dan pemeliharaan																							
1	0 2 2	0 2 2	2. 0 1	1 2	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan				1 Paket	Rp 1.000.000. 000	1 Paket	Rp 1.000.000. 000					Rp 1.000.000 .000	Bidang Yankes	Kota Mak assar									



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.2.001.1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diadakan								1 Paket	Rp 1.000.000.000	1 Paket	Rp 1.000.000.000				Rp 1.000.000.000	Bidang Yankes	Kota Makassar
1.02.2.001.4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas pada Pelayanan Kesehatan				55%	Rp 14.477.004.142	55%	Rp 14.475.444.150	55%	Rp 15.921.178.550	55%	Rp 17.511.486.400	55%	Rp 18.387.060.750	55%	Rp 18.387.060.750	Bidang PSDK	Kota Makassar
1.02.2.001.5	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara				1969 unit	Rp 946.766.000	1969 unit	Rp 946.766.000	1969 unit	Rp 946.766.000	1969 unit	Rp 946.766.000	1969 unit	Rp 946.766.000	1969 unit	Rp 1.054.652.550	Bidang Yankes	Kota Makassar
1.02.2.001.6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat yang diadakan				58 Jenis	Rp 1.602.428.084	58 Jenis	Rp 1.752.266.250	58 Jenis	Rp 1.926.429.400	58 Jenis	Rp 2.118.008.900	58 Jenis	Rp 2.223.909.350	58 Jenis	Rp 2.223.909.350	Bidang PSDK	Kota Makassar
1.02.2.001.7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang diadakan				54 Jenis	Rp 2.403.586.062	54 Jenis	Rp 2.564.120.670	54 Jenis	Rp 2.819.469.280	54 Jenis	Rp 3.100.352.760	54 Jenis	Rp 3.255.370.400	54 Jenis	Rp 3.255.370.400	Bidang PSDK	Kota Makassar
1.02.2.001.8	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat pemeliharaan																	
1.02.2.001.9	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat pemeliharaan																	
1.02.2.001.0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapat pemeliharaan rutin dan berkala																	



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kota Makassar yang disediakan																
1.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	210.180.000	100%	376.542.000	100%	376.542.000	100%	375.898.000	100%	394.692.900	100%	1.733.854.900		Bidang Kesmas	Kota Makassar
1.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	1.001.996.000	100%	993.520.000	100%	993.496.000	100%	993.200.000	100%	1.042.860.000	100%	5.025.072.000		Bidang Kesmas	Kota Makassar
1.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	38.140.000	100%	58.244.000	100%	58.244.000	100%	58.244.000	100%	61.156.200	100%	274.028.200		Bidang Kesmas	Kota Makassar
1.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	51.014.000	100%	102.029.000	100%	101.329.000	100%	67.959.000	100%	71.356.950	100%	393.687.950		Bidang Kesmas	Kota Makassar
1.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	200.436.000	100%	244.430.000	100%	244.430.000	100%	244.430.000	100%	256.651.500	100%	1.190.377.500		Bidang Yankes & Bidang Kesmas	Kota Makassar
1.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	41.920.000	100%	4.154.118.000	100%	4.157.118.000	100%	4.165.286.000	100%	4.574.500.300	100%	17.092.942.300		Bidang P2P	Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1020207	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	24.534.000	100%	24.534.000	100%	24.534.000	100%	24.534.000	100%	24.534.000	100%	122.670.000	Bidang Kesmas	Kota Makassar
1020208	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	38.555.000	100%	42.506.000	100%	42.506.000	100%	42.506.000	100%	42.506.000	100%	208.579.000	Bidang P2P	Kota Makassar
1020209	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	42.700.000	100%	44.372.000	100%	45.260.000	100%	46.165.200	100%	47.089.000	100%	225.586.200	Bidang P2P	Kota Makassar
1020210	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		100%	58.927.000	100%	65.000.000	100%	67.500.000	100%	70.000.000	100%	72.000.000	100%	333.427.000	Bidang P2P	Kota Makassar
1020211	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	1,319,381,000	100%	2,568,555,000	100%	2,733,355,000	100%	2,745,755,000	100%	2,713,042,750	100%	12,080,088,750	Bidang P2P	Kota Makassar
1020212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan		100%	1,502,506,000	100%	1,979,151,000	100%	1,998,734,000	100%	2,018,708,700	100%	2,039,082,850	100%	9,538,182,550	Bidang P2P	Kota Makassar

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI												
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra															
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.														
(3)				(4)				(5)				(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 Jam		100%	Rp 62.361.000	100%	Rp 164.214.100	100%	Rp 167.498.400	100%	Rp 170.848.400	100%	Rp 174.265.350	100%	739.187.250	Bidang P2P	Kota Makassar												
1.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana yang dikelola																											
1.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase penduduk yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi		80%	Rp 2.350.240.000	80%	Rp 2.671.691.400	80%	Rp 2.805.275.950	80%	Rp 2.945.539.750	80%	Rp 3.092.816.750	80%	13.865.563.850	Bidang Kesmas	Kota Makassar												
1.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dikelola		47 PKM, 250 Orang Calon Jamaah Haji, 100 orang ASN / 7 Kegiatan	Rp 124.025.200	47 PKM, 250 Orang Calon Jamaah Haji, 100 orang ASN / 7 Kegiatan	Rp 216.950.000	47 PKM, 250 Orang Calon Jamaah Haji, 100 orang ASN / 7 Kegiatan	Rp 240.666.300	47 PKM, 250 Orang Calon Jamaah Haji, 100 orang ASN / 7 Kegiatan	Rp 285.574.640	47 PKM, 250 Orang Calon Jamaah Haji, 100 orang ASN / 7 Kegiatan	Rp 299.853.372	47 PKM, 250 Orang Calon Jamaah Haji, 100 orang ASN / 7 Kegiatan	1.167.069.512	Bidang Kesmas	Kota Makassar												
1.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Lingkungan yang diawasi		15 Kecamatan	Rp 1.101.951.000	15 Kecamatan	Rp 1.731.519.900	15 Kecamatan	Rp 348.597.700	15 Kecamatan	Rp 357.961.120	15 Kecamatan	Rp 375.859.170	15 Kecamatan	3.915.888.890	Bidang Kesmas	Kota Makassar												



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI				
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra							
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.						
(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	0 2	0 2	2. 0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan yang dikelola		12 Kegiatan	Rp 342.963.000	12 Kegiatan	Rp 494.694.500	12 Kegiatan	Rp 570.271.000	12 Kegiatan	Rp 494.441.000	12 Kegiatan	Rp 519.163.050	12 Kegiatan	2.421.532.550	Bidang Kesmas	Kota Makassar
1	0 2	0 2	2. 0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang dibina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		47 PKM	Rp 26.956.000	47 PKM	Rp 54.204.000	47 PKM	Rp 69.794.000	47 PKM	Rp 69.794.000	47 PKM	Rp 73.283.700	47 PKM	294.031.700	Bidang Yankes	Kota Makassar
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen kajian dan penilaian resiko penyakit infeksi emerging		4 Dokumen	Rp 136.116.000	4 Dokumen	Rp 195.000.000	4 Dokumen	Rp 197.500.200	4 Dokumen	Rp 162.515.100	4 Dokumen	Rp 170.640.855	4 Dokumen	861.772.155	Bidang P2P	Kota Makassar
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang dikelola				100%	Rp 63.254.000	100%	Rp 68.654.000	100%	Rp 74.646.000	100%	Rp 78.378.300	100%	284.932.300	Bidang P2P	Kota Makassar
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA yang dikelola		100%	Rp 73.594.000	100%	Rp 87.876.000	100%	Rp 89.633.500	100%	Rp 94.115.200	100%	Rp 95.997.500	100%	441.216.200	Bidang P2P	Kota Makassar
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Upaya Kesehatan Khusus yang dikelola													-		
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 4	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan yang dikelola													-		
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular		7 Jenis kegiatan	Rp 4.996.661.558	7 Jenis kegiatan	Rp 9.050.000.000	7 Jenis kegiatan	Rp 9.100.000.000	7 Jenis kegiatan	Rp 9.150.000.000	7 Jenis kegiatan	Rp 9.150.000.000	7 Jenis kegiatan	41.446.661.558	Bidang P2P	Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI																						
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra																									
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.																								
(3)			(4)			(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)	
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Bantuan iuran integrasi peserta gratis JKN/PBPU pemda	281178 peserta	Rp 125,841,038,400	281178 peserta	Rp 136,926,552,000	281178 peserta	Rp 136,926,552,000	281178 peserta	Rp 143,772,879,600	281178 peserta	680,393,574,000		Bidang PSDK	Kota Makassar																				
						Bantuan iuran pekerja bukan penerima upah (PBPU) kls 3 aktif	279292 peserta		279292 peserta		279292 peserta		279292 peserta		279292 peserta	-																							
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			3 Jenis Kegiatan	Rp 95.700.000	3 Jenis Kegiatan	Rp 100.209.000	3 Jenis Kegiatan	Rp 119.709.000	3 Jenis Kegiatan	125.694.450	441.312.450	Bidang P2P	Kota Makassar																				
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB yang diambil dan dikirim ke Lab Rujukan/Nasional	30 Spesimen	Rp 18.000.000	30 Spesimen	Rp 21.780.000	30 Spesimen	Rp 23.958.000	30 Spesimen	Rp 26.353.800	30 Spesimen	27.671.490	117.763.290	Bidang P2P	Kota Makassar																				
1	0 2	0 2	2. 0 2	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat yang diselenggarakan	15 Kecamatan/6 Kegiatan	Rp 364.737.000	15 Kecamatan/6 Kegiatan	Rp 389.765.200	15 Kecamatan/6 Kegiatan	Rp 432.178.400	15 Kecamatan/6 Kegiatan	Rp 381.909.570	15 Kecamatan/6 Kegiatan	401.005.049	1.969.595.219	Bidang Kesmas	Kota Makassar																				
1	0 2	0 2	2. 0 2	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	47 Puskesmas	Rp 1.878.823.000	47 Puskesmas	Rp 2.512.209.000	47 Puskesmas	Rp 2.662.209.000	47 Puskesmas	Rp 2.667.209.000	47 Puskesmas	2.800.569.450	12.521.019.450	Bidang Yankes	Kota Makassar																				
1	0 2	0 2	2. 0 2	3 1	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah puskesmas dan RS yang dilaksanakan Survey Kepuasan	47 Puskesmas & 1 RSUD	Rp 300.000.000	47 Puskesmas & 1 RSUD	Rp 300.000.000	47 Puskesmas & 1 RSUD	Rp 300.000.000	47 Puskesmas & 1 RSUD	Rp 300.000.000	47 Puskesmas & 1 RSUD	300.000.000	1.500.000.000	Bidang Yankes	Kota Makassar																				



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.2.02.3	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1 Paket	Rp 89.377.916.930	1 Paket	Rp 98.315.708.623	1 Paket	Rp 108.147.279.485	1 Paket	Rp 118.962.007.434	1 Paket	Rp 130.858.208.177	1 Paket	Rp 545.661.120.649	RSUD	Kota Makassar		
1.02.2.02.3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional		46 Puskesmas	Rp 170,049,165,000	46 Puskesmas	Rp 187,054,081,500	46 Puskesmas	Rp 196,406,785,575	46 Puskesmas	Rp 206,227,124,853.75	46 Puskesmas	Rp 216,538,481,096	46 Puskesmas	Rp 976,275,638,025	Puskesmas	Kota Makassar		
1.02.2.02.3.4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 Paket (PMI, PDPI, PPNI)	Rp 4.160.000.000	3 Paket	Rp 5.000.000.000	3 Paket	Rp 5.000.000.000	3 Paket	Rp 5.000.000.000	3 Paket	Rp 5.000.000.000	3 Paket	Rp 24.160.000.000	PMI, PPDI dan PPNI	Kota Makassar		
1.02.2.02.3.5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang disurvei ulang (pascaakreditasi)		25 Puskesmas	Rp 4.400.685.000			20 Puskesmas	Rp 411.215.000	25 Puskesmas	Rp 1.853.840.000			45 Puskesmas	Rp 6.665.740.000	Bidang Yankes	Kota Makassar		
1.02.2.02.3.6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam penatalaksanaan KIPi (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		Bidang P2P	Kota Makassar		
		Jumlah peserta sosialisasi program imunisasi dan PD3I (penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi)		100 Orang	Rp 76.440.000	100 Orang	Rp 226.039.000	100 Orang	Rp 205.490.000	100 Orang	Rp 205.490.000	100 Orang	Rp 205.490.000	100 Orang	Rp 3.603.740.000				
		Jumlah peserta workshop strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang terintegrasi dengan promkes untuk pencapaian imunisasi rutin lengkap		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang					



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.2.037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (SKDR)		52 Dokumen	Rp 38.799.000	52 Dokumen	Rp 124.256.000	52 Dokumen	Rp 112.960.000	52 Dokumen	Rp 112.960.000	52 Dokumen	Rp 112.960.000	52 Dokumen	Rp 501.935.000	Bidang p2p	Kota Makassar
1.02.2.033	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang diselenggarakan															
1.02.2.031	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Data dan Informasi Kesehatan yang dikelola		1 paket	Rp 307.254.000	1 paket	Rp 413.048.000	1 paket	Rp 413.048.000	1 paket	Rp 413.048.000	1 paket	Rp 413.048.000	1 paket	Rp 1.959.446.000	Bidang Yankes & Subag Perencanaan	Kota Makassar
1.02.2.032	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola		4 Paket	Rp 358.032.000	4 Paket	Rp 341.610.410	4 Paket	Rp 345.054.470	4 Paket	Rp 348.810.140	4 Paket	Rp 366.250.647	4 Paket	Rp 1.759.757.667	Bidang Yankes & Subag Perencanaan	Dinas Kesehatan dan 47 Puskesmas
1.02.2.033	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan				1 Paket	Rp 100.000.000			1 Paket	Rp 25.000.000	1 Paket	Rp 25.000.000	1 Paket	Rp 150.000.000	Subag Perencanaan	Kota Makassar
1.02.2.034	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kota Makassar yang diterbitkan															



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI												
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra															
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.														
(3)				(4)				(5)				(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.2.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D yang mendapat Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		28 RS	Rp 32.120.000	28 RS	Rp 171.947.950	28 RS	Rp 179.612.789	28 RS	Rp 199.744.068	28 RS	Rp 209.731.271	28 RS	Rp 793.156.078	Bidang Yankes	Kota Makassar												
1.02.2.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kota Makassar yang mendapat peningkatan tata kelola		28 RS	Rp 47.462.250	28 RS	Rp 52.108.480	28 RS	Rp 57.429.320	28 RS	Rp 60.300.790	28 RS	Rp 217.300.840	Bidang Yankes	Kota Makassar														
1.02.2.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang mendapat peningkatan mutu		28 RS	Rp 16.134.000	28 RS	Rp 90.727.010	28 RS	Rp 99.799.711	28 RS	Rp 109.779.680	28 RS	Rp 115.268.660	28 RS	Rp 431.709.061	Bidang Yankes	Kota Makassar												
1.02.2.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang disiapkan		13 Rumusan	Rp 44.453.000	13 Rumusan	Rp 19.896.300	13 Rumusan	Rp 21.885.630	13 Rumusan	Rp 24.074.190	13 Rumusan	Rp 25.277.900	13 Rumusan	Rp 135.587.020	Bidang Yankes	Kota Makassar												
1.02.3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Teknis</b>	75%	85%	Rp 267.541.000	90%	Rp 535.606.500	95%	Rp 639.328.500	100%	Rp 724.110.500	100%	Rp 610.954.200	100%	Rp 2.777.540.700														
1.02.3.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kota Makassar yang diterbitkan																											



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.3.01	Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan yang mendapat Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut		100	Rp 150.756.000	100	Rp 294.936.500	100	Rp 334.063.500	100	Rp 354.250.500	100	Rp 233.711.500	100	1.367.718.000	Bidang PSDK	Kota Makassar
1.02.3.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Makassar yang mendapat Pembinaan Teknis dan Pengawasan		100		100		100		100		100		100			
1.02.3.01	Perencanaan dan Distribusi serta pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang didistribusi/pemerataan		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Kota Makassar
1.02.3.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terpenuhi sesuai Standar															
1.02.3.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		10 Kegiatan	Rp 59.920.000	10 Kegiatan	Rp 107.142.000	10 Kegiatan	Rp 127.398.000	10 Kegiatan	Rp 147.654.000	10 Kegiatan	Rp 155.036.700	10 Kegiatan	597.150.700	Bidang PSDK	Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.02.3.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Makassar yang mendapat Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis																
1.02.3.03.01	Pengembangan mutu dan Peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mendapat Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		100%	Rp 56.865.000	100%	Rp 133.528.000	100%	Rp 177.867.000	100%	Rp 222.206.000	100%	Rp 222.206.000	100%	812.672.000	Bidang PSDK	Kota Makassar	
1.02.3.04	Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat sertifikasi																
1.02.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN KEBUTUHAN FARMASI PADA RSUD DAN PUSKESMAS	100%	100%	Rp 1.251.632.000	100%	Rp 1.459.106.350	100%	Rp 1.503.362.192	100%	Rp 1.626.917.749	100%	Rp 1.651.514.694	100%	Rp 6.934.216.695			
		PERSENTASE KETERSEDIAAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN PADA RSUD DAN PUSKESMAS	56,60%	60%		62%		64%		66%		68%		68%				
1.02.4.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan																



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Jumlah Toko Alat Kesehatan (Baru) yang mendapatkan rekomendasi		10 Toko Alkes (Baru)		10 Toko Alkes (Baru)		10 Toko Alkes (Baru)		10 Toko Alkes (Baru)		10 Toko Alkes (Baru)		10 Toko Alkes (Baru)				
1	0 2 4 0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		130 Apotik, 15 Toko Obat, 23 Toko Alkes dan 2 UMOT	Rp 153.076. 000	130 Apotik, 15 Toko Obat, 23 Toko Alkes dan 2 UMOT	Rp 168.311. 500	130 Apotik, 15 Toko Obat, 23 Toko Alkes dan 2 UMOT	Rp 170.858.5 00	130 Apotik, 15 Toko Obat, 23 Toko Alkes dan 2 UMOT	Rp 172.359.5 00	130 Apotik, 15 Toko Obat, 23 Toko Alkes dan 2 UMOT	Rp 180.977. 475	130 Apotik, 15 Toko Obat, 23 Toko Alkes dan 2 UMOT	Rp 845.582.9 75		Bidang PSDK	Kota Makassar
		Jumlah jenis kegiatan pengendalian dan pengawasan izin sarana toko alkes dan izin edar produk alkes		3 jenis kegiatan		3 jenis kegiatan		3 jenis kegiatan		3 jenis kegiatan		3 jenis kegiatan		3 jenis kegiatan				Kota Makassar
1	0 2 4 0 1	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		100%		100%		100%		100%		100%		100%				



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.02.04.203	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapat fasilitasi pemenuhan komitmen		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
1.02.04.202	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu yang diterbitkan		10 PKRT		10 PKRT		10 PKRT		10 PKRT		10 PKRT		10 PKRT				
1.02.04.201	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	Jumlah Sertifikat Produksi Alat Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 yang mendapat pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut																
1.02.04.202	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut		10 PKRT (2 Jenis Kegiatan)	Rp 15.167.000	10 PKRT (2 Jenis Kegiatan)	Rp 27.915.000	10 PKRT (2 Jenis Kegiatan)	Rp 27.915.000	10 PKRT (2 Jenis Kegiatan)	Rp 27.915.000	10 PKRT (2 Jenis Kegiatan)	Rp 29.310.750	10 PKRT (2 Jenis Kegiatan)	128.222.750	Bidang PSDK	Kota Makassar	



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan																
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Sarana PIRT Baru yang diawasi		100%	Rp 390.587.000	100%	Rp 441.756.650	100%	Rp 508.009.892	100%	Rp 584.299.889	100%	Rp 584.299.889	100%	Rp 2.508.953.320		Bidang PSDK	Kota Makassar
		Jumlah PIRT yang mendapat pembinaan dan sertifikat PIRT yang diterbitkan		200 PIRT		200 PIRT		200 PIRT		200 PIRT		200 PIRT		200 PIRT				Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan																
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yaitu rumah makan/restoran, catering dan Depot Air Minum (DAMIU) yang diterbitkan		100 Sarana	Rp 106.188.000	100 Sarana	Rp 149.550.300	100 Sarana	Rp 150.213.100	100 Sarana	Rp 152.364.890	100 Sarana	Rp 159.983.130	100 Sarana	Rp 159.983.130		Bidang PSDK	Kota Makassar
		Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yaitu Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga, Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)		3165 Sarana		3165 Sarana		3165 Sarana		3165 Sarana		3165 Sarana		3165 Sarana				Kota Makassar
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan																



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.024.205.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah stiker pembinaa pada makanan jajanan dan sentral makanan jajanan yang diterbitkan		3288 Lembar utk Makanan Jajanan dan 3200 lembar DAMIU	Rp 36.291.000	3288 Lembar utk Makanan Jajanan dan 3200 lembar DAMIU	Rp 120.894.900	3288 Lembar utk Makanan Jajanan dan 3200 lembar DAMIU	Rp 95.687.700	3288 Lembar utk Makanan Jajanan dan 3200 lembar DAMIU	Rp 139.300.470	3288 Lembar utk Makanan Jajanan dan 3200 lembar DAMIU	Rp 146.265.450	3288 Lembar utk Makanan Jajanan dan 3200 lembar DAMIU	Rp 538.439.520		Bidang PSDK	Kota Makassar
		Jumlah pedagang makanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi		1644 Sarana		1644 Sarana		1644 Sarana		1644 Sarana		1644 Sarana		1644 Sarana				Kota Makassar
1.024.206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang mendapat pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan																
1.024.206.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market (Pasar Modern dan Pasar Tradisional) yang diperiksa/diawasi dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		4 Pasar Modern .4 Pasar Tradisional. Apotik dan Toko Obat	Rp 550.323.000	4 Pasar Modern .4 Pasar Tradisional. Apotik dan Toko Obat	Rp 550.678.000	4 Pasar Modern .4 Pasar Tradisional. Apotik dan Toko Obat	Rp 550.678.000	4 Pasar Modern .4 Pasar Tradisional. Apotik dan Toko Obat	Rp 550.678.000	4 Pasar Modern .4 Pasar Tradisional. Apotik dan Toko Obat	Rp 550.678.000	4 Pasar Modern .4 Pasar Tradisional. Apotik dan Toko Obat	Rp 2.753.035.000		Bidang PSDK	Kota Makassar



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.02.04.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Perizinan Industri Rumah Tangga yang mendapat penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut																	
1.02.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF</b>	40%	45%	Rp 7.818.287.000	50%	Rp 8.037.982.150	55%	Rp 8.239.216.850	60%	Rp 8.403.800.050	65%	Rp 8.572.254.150	65%	Rp 41.071.540.200				
		<b>PERSENTASE POSYANDU AKTIF</b>	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
1.02.05.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan			Rp 7.336.514.000		Rp 7.508.925.850		Rp 7.659.105.000		Rp 7.812.287.100		Rp 7.968.532.850		Rp 38.285.364.800				
1.02.05.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah posyandu yang menerima bantuan biaya operasional		1012 posyandu	Rp 7.336.514.000	1012 posyandu	Rp 7.508.925.850	1012 posyandu	Rp 7.659.105.000	1012 posyandu	Rp 7.812.287.100	1012 posyandu	Rp 7.968.532.850	1012 posyandu	Rp 38.285.364.800	Bidang Kesmas	Kota Makassar		
1.02.05.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kota Makassar yang dilaksanakan			Rp 469.433.000		Rp 516.376.300		Rp 567.555.850		Rp 578.906.950		Rp 590.485.000		Rp 2.722.757.100				
1.02.05.02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat yang diselenggarakan		12 Kegiatan	Rp 469.433.000	12 Kegiatan	Rp 516.376.300	12 Kegiatan	Rp 567.555.850	12 Kegiatan	Rp 578.906.950	12 Kegiatan	Rp 590.485.000	12 Kegiatan	Rp 2.722.757.100	Bidang Kesmas	Kota Makassar		



KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja PD penanggung jawab	LOKASI		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
				T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1.02.5.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kota Makassar yang dikembangkan dan dilaksanakan			Rp 12.340.00		Rp 12.680.00		Rp 12.556.00		Rp 12.606.00		Rp 13.236.300		Rp 63.418.300				
1.02.5.3.1	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan		12 Kegiatan	Rp 12.340.00		12 Kegiatan	Rp 12.680.00		12 Kegiatan	Rp 12.556.00		12 Kegiatan	Rp 13.236.300		12 Kegiatan	Rp 63.418.300	Bidang Kesmas	Kota Makassar
<b>Total Anggaran</b>					Rp 612.461.081.451		Rp 941.793.251.913		Rp 786.395.564.562		Rp 816.352.051.175		Rp 907.189.335.972						

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar



**dr.Hj.A.Hadijah Iriani R, Sp.THT, M.Si.**

NIP. 19610807 198803 2 005



**LKJIP**  
**DINAS KESEHATAN**

**T A H U N 2 0 2 3**

**JANGAN BIARKAN MAKASSAR MUNDUR LAGI**